



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
DENGAN
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN RI**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke- : 8 (delapan)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 28 Maret 2022
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. 15.10 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Ketua Rapat : Sudin, S.E./F-PDIP/Ketua Komisi IV DPR RI
Acara : 1. Tindak lanjut kunjungan kerja Komisi IV DPR RI;
2. Program prioritas tahun 2023; dan
3. Isu-isu aktual lainnya.
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy/Kabag Set. Komisi IV DPR RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
37 dari 53 orang Anggota dengan rincian:
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
10 dari 11 orang Anggota
1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
2. Riezky Aprilia, S.H., M.H.
3. H. Sunarna, S.E., M.Hum.
4. Ir. Mindo Sianipar
5. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
6. Drs. I Made Urip, M.Si. (Virtual)
7. Dr. H. Sustrisno, S.E., M.Si.
8. Vita Ervina, S.E., M.B.A.
9. Maria Lestari, S.Pd (Virtual)
10. Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. (Virtual)
2. Fraksi Partai Golongan Karya
7 dari 8 orang Anggota

1. H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil Ketua
Komisi IV DPR RI
 2. H.M. Salim Fakhry, S.E.,M.M. (Virtual)
 3. Firman Soebayo, S.E., M.H.
 4. Ir. H. Hanan A. Rozak, M.S.
 5. Budhi Setiawan (Virtual)
 6. Alien Mus
 7. Teti Rohatiningsih, S.Sos. (Virtual)
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
6 dari 7 orang Anggota
1. G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua
Komisi IV DPR RI
 2. Ir. K.R.T. H. Darori Wonodipuro, M.M.
 3. Ir. H.T.A. Khalid, M.M.
 4. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari,
DESS., M.Sc.
 5. Ir. Dwita Ria Gunadi
 6. Dr. Azikin Solthan, M.Si. (Virtual)
4. Fraksi Partai Nasional Demokrat
3 dari 6 orang Anggota
1. H. Sulaeman L. Hamzah
 2. Ir. Abdullah Tuasikal (Virtual)
 3. Yessy Melania, S.E.
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
3 dari 6 orang Anggota
1. Anggia Erma Rini, M.K.M./Wakil Ketua
Komisi IV DPR RI
 2. Luluk Nur Hamidah, M.Si.,M.P.A.
(Virtual)
 3. Daniel Johan, S.E.
6. Fraksi Partai Demokrat
3 dari 5 orang Anggota
1. Dr. Suhardi Duka, M.M.
 2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
 3. Muhammad Dhevy Bijak Pawindu
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
3 dari 5 orang Anggota
1. drh. H. Slamet
 2. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP.,M.M
(Virtual)
 3. Prof. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
8. Fraksi Partai Amanat Nasional

2 dari 3 orang Anggota

1. Haerudin, S.Ag., M.H. (Virtual)
2. Fachry Pahlevi Kanggoasa, S.E. (Virtual)

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
0 dari 2 orang Anggota

B. Pemerintah:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.);
2. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D.);
3. Sekretaris Jenderal sekaligus Plt. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.);
4. Inspektur Jenderal (Ir. Laksmi Wijayanti, MCP.);
5. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc.)
6. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ir. Wiratno, M.Sc.);
7. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.);
8. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum.);
9. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc.);
10. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A.);
11. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc.);
12. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M.);
13. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc.);
14. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ir. Ary Sudijanto, M.Sc.);

15. Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Ir. Hartono, M.Sc.);
16. Direktur Utama Perum Perhutani (Wahyu Kuncoro);
17. Direktur Utama PT Inhutani I (Oman Suherman);
18. Direktur PT Inhutani II (Ir. Bakhrizal Bakri, M.M.);
19. Direktur PT Inhutani IV (Sri Widodo); dan
20. Direktur Utama PT Inhutani V (Dicky Yuana Rady).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Turut berduka cita mantan Anggota Komisi IV, Bapak Ichsan Firdaus, kemarin pagi meninggal dunia. Beliau sudah cukup lama di Komisi IV, kemudian terakhir dipindahkan ke Komisi VI. Jadi apabila Almarhum ada kesalahan mohon dimaafkan, karena setiap manusia tidak luput daripada kesalahan.

Ya, terima kasih, kita mulai.

Bismilahirrahmanirahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV,
Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajaran,
Yang terhormat Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove,
Yang terhormat Direktur Utama Perum Perhutani beserta jajaran,
Yang terhormat Direktur Utama PT Inhutani I sampai dengan V,
Hadirin yang kami hormati,

Mengawali rapat ini marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan rapat kerja ini dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan jadwal acara rapat, Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus, 4 Februari 2022 dan rapat internal 16 Maret 2022 pada hari ini Senin tanggal 28 Maret 2022, Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam rangka: yang pertama, tindak lanjut kunjungan kerja Komisi IV; dua, program prioritas tahun 2023 dan isu aktual lainnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) tentang Tata Tertib, rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.10 WIB)

Rapat kerja hari ini kita mulai pada pukul 10.30 dan akan diakhiri pada pukul 13.30. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 ayat (2) tentang Tata Tertib dengan susunan acara sebagai berikut;

1. pengantar ketua rapat;
2. penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. tanggapan Anggota Komisi IV;
4. jawaban Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. kesimpulan rapat;
6. penutup.

Apakah acara disetujui?

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Dalam melaksanakan tiga fungsi Komisi IV sebagai salah satu kelengkapan dewan melaksanakan tugasnya dengan melakukan kunjungan kerja, baik kunjungan kerja reses maupun kunjungan kerja spesifik, dan kunjungan Panja. Dalam kesempatan ini Komisi IV ingin mendapatkan penjelasan secara detail mengenai tindak lanjut beberapa Kunker yang telah dilaksanakan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Masih banyak laporan dan belum adanya tindak lanjut atau penyelesaian yang final dari permasalahan yang menjadi aspirasi masyarakat. Tidak dilanjutkan atau *emang* didiamkan, ini versi saya seperti itu. Jadi ingat *loh*, ada Undang-Undang 41 *nih*. Saya juga berharap kalau pejabatnya lalai atau belagak *bego*, belagak *diem*, nanti kalau perlu undang-undangnya kita ubah, ya, Kanjeng, ya? Pejabatnyapun harus masuk penjara kalau mendiamkan atau pembiaran.

Selanjutnya, Komisi IV memandang program dan kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut yang sudah berjalan selama ini perlu perbaikan dan peningkatan perbaikan dan peningkatan informasi. Inovasi program dilakukan dengan cara menerima masukan dari semua lapisan masyarakat dan *stakeholder* agar program dan kegiatan memberikan manfaat lebih besar untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pelestarian hutan, meningkatnya kualitas sumber daya aparatur kementerian, serta pemenuhan komitmen global untuk memenuhi perubahan iklim. Hal ini memerlukan sinergitas yang baik dengan rencana kerja pemerintah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang (RPJMN) 2020-2024. Untuk itu, Komisi IV meminta penjelasan usulan pagu

anggaran indikatif kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 11,221 triliun dalam rangka menuju perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Indonesia baru saja selesai menjadi tuan rumah penyelenggara *Inter Parliamentary Union* (IPU) ke-144 pada 20 sampai 24 2022. Kali ini mengusung tema *getting to zero mobilizing parliament to action on climate change*. Jadi jangan hanya slogannya *aja nih*. Isu perubahan iklim diambil sebagai tema besar karena menyangkut kelangsungan hidup dan keselamatan dunia, yang mana isu perubahan iklim ini menjadi sangat relevan di saat pemanasan global menjadi tantangan eksistensi bagi planet bumi. Sidang IPU ke-144 menghasilkan Deklarasi Nusa Dua yang mencerminkan usaha mobilisasi aksi parlemen untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Oleh karena itu, Komisi IV berkomitmen untuk menjalankan dan memastikan implementasi dari deklarasi yang dimaksud menjadi prioritas dalam melaksanakan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Untuk melaksanakan dan mengimplementasikan Deklarasi Nusa Dua, Komisi IV mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadopsi konsep pembangunan *green economy* atau ekonomi hijau dalam menyusun kebijakan implementasi program nasional. Konsep ekonomi hijau adalah konsep pembangunan ekonomi yang mengamankan pertumbuhan ekonomi yang kuat namun ramah lingkungan, inklusif secara sosial. Ekonomi hijau diharapkan menjadi jawaban atau antitesa model pembangunan konvensional yang mengandalkan praktik yang berkelanjutan seperti penguasaan dan penghancuran sumber daya alam, khususnya sumber daya hutan dan lahan. Memperhatikan mandat Deklarasi Nusa Dua, isu-isu tentang perubahan iklim *forestry and other land use* serta proses recovery pasca pandemi Covid 19 yang terjadi sejak tahun 2020, maka Komisi IV meminta agar hal tersebut tergambar di dalam bahan yang akan disampaikan pada rapat kerja.

Saya di Lampung kemarin diprotes sama masyarakat. Jadi ada orang di Lampung Barat dari tahun 1952 sudah tinggal di sana, tiba-tiba itu masuk hutan lindung, nama kecamatannya di sana lebih dikenal Sukapura, mungkin 80% penduduknya adalah orang Jawa Barat, saudaranya Kang Dedi. Mereka sudah demo ke mana-mana, sudah katanya ketemu pejabat di Kementerian Kehutanan, ya segala macam sudahlah, tapi sampai hari ini belum ada tindak lanjut. Mereka bilang pejabat Kementerian Kehutanan tukang tipu, *ngomong* akan *diurusin*, akan *diurusin*, akan diselesaikan. Saya bilang, "Satu catatan ya, satu catatan, saya tidak mau ada spanduk-spanduk yang menyudutkan pemerintah, saya enggak mau." Saya bilang, "Cabut dulu, baru nanti bicara lagi sama saya. Ini saya ingatkan ini." Saya juga malu. "Kami sudah bosan, Pak. Mengadu partai ini, partai ini, partai ini, semua datang menjanjikan, Pak, tapi sampai hari ini belum ada, Pak." Saya bilang, "Saya enggak bakal janji", saya bilang, "Karena saya tidak tahu permasalahannya." Banyak juga yang menjadi pahlawan kesiangan akan menyelesaikan, tapi nyatanya sampai hari ini tidak ada. Saya minta segera dibuatkan laporannya, paling lama 1 bulan, nanti tolong dimasukkan kesimpulan rapat.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Demikianlah pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal di atas. Kami persilakan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim,

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om swastiastu,*

Yang kami hormati Pimpinan,
Yang terhormat Ketua,
Yang terhormat Wakil Ketua Komisi IV DPR RI,
Yang kami hormati Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI, baik yang hadir di Senayan maupun yang virtual,

Pertama, kami menyampaikan juga rasa syukur pada Tuhan atas rapat kerja hari ini, dan kami juga menyampaikan rasa duka cita yang sangat mendalam atas wafatnya yang terhormat Bapak Firdaus Ichsan yang sangat produktif dan kami juga merasakan banyak bimbingan dari beliau. Jadi kami juga menyampaikan rasa duka cita yang sangat dalam.

Sebagaimana tadi yang disampaikan dalam pengantar yang terhormat Ketua Komisi IV DPR RI bahwa kami akan melaporkan tentang tindak lanjut Kunker dan juga program 2023 dan beberapa isu aktual. Kami telah menyiapkan laporan tertulis dan nanti di dalam penjelasan kami akan menyampaikan *highlight* dan beberapa informasi tambahan dari perkembangan di lapangan.

Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan tentang tindak lanjut hasil Kunker reses dan spesifik, yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, yaitu berkenaan dengan pengelolaan sampah, pencemaran lingkungan, penggunaan kawasan hutan secara ilegal, padat karya percepatan mangrove. Mohon izin, Pak Ketua, nanti untuk mangrove mungkin kami mohon diberikan kesempatan juga kepada Kepala BRGM untuk menyampaikan secara ringkas juga tentang pencemaran lingkungan di Danau Singkarak dan Citarum Harum, mitigasi banjir dan longsor di area daerah aliran sungai dan *progress* pembangunan ibu kota nusantara (IKN). Terkait dengan persoalan pengolahan sampah yang di spot yang dikunjungi TPA Sekoto Desa Baringin, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, izinkan kami melaporkan bahwa KLHK telah melakukan pendampingan kepada pemda kabupaten di dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui budidaya maggot, jadi budidaya hewan ternak sapi dan bebek yang dapat menjadi nilai tambah bagi masyarakat di sekitar TPA.

Pimpinan, saya mohon izin melaporkan bahwa pengelolaan sampah dengan budidaya maggot ini juga telah berkembang dan saya berterima kasih yang tak terhingga kepada para yang terhormat Anggota Komisi IV yang juga memberikan bimbingan kepada masyarakat seperti Mojokerto dan lain-lainnya di Jawa Timur, dari yang terhormat Bapak Mindo, kemudian Pati juga di Jawa Tengah, dari Pak Firman dan lain-lain, kami juga merekam yang di Tangerang, di Depok, di Bandung, di Jambi, itu sudah semakin meluas, Ibu dan Bapak Anggota dan Pimpinan yang kami hormati, dan sudah ada juga kelihatannya perintisan untuk ekspor ke luar negeri. Mengapa? Karena dia, maggot ini, selamat datang, Ibu Wakil Ketua, menjadi sumber pakan ternak yang harganya cukup baik yaitu 13.000 sampai 15.000 per kilogram basah atau sampai dengan 50.000 per kilogram kalau kering. Jadi bahasa hariannya disebutnya *black soldier flies*. Ini kelihatannya berkembang terus dan kementerian terus mengikuti perkembangannya.

Selanjutnya berkenaan dengan Kunker di TNGL, penyewaan lahan di kawasan konservasi dari aspek *law enforcement*, kita juga coba melakukan persuasif, pendekatan kepada masyarakat juga terus dilakukan. Karena begini, kami percaya bahwa Kunker ini hanya sebuah *spot of snapshot* observasi tetapi sebetulnya maksudnya adalah untuk *case* yang sama di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Jadi pengumpulan data terus dilakukan, penegakan hukum, operasi pengamanan dan yustisi terhadap aktivitas ilegal juga dilakukan. Secara normatif ilegal itu memang tidak boleh, termasuk sewa menyewa di kawasan konservasi itu tidak boleh, tidak sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal KSDAE telah juga melakukan pembinaan dalam bentuk kemitraan konservasi. Saat ini se-Indonesia sudah dilakukan kemitraan konservasi pada areal 176.000 hektar kira-kira, seperti antara lain di TNGL ini 5.000 hektar dan juga di tempat-tempat yang lain. Jadi pada prinsipnya, Pak Ketua, Kunker lapangan itu memberikan arahan untuk kementerian bisa memperbaiki berbagai hal.

Terkait dengan permasalahan penambangan emas tanpa izin, jadi operasi pengamanan dan pemulihan pertambangan sudah dilakukan kasus pidana penambangan tanpa izin juga telah dilakukan ini yang di Bukit Soeharto. Kami juga mohon izin melaporkan bahwa dalam 1-2 minggu terakhir ini sampai dengan tanggal 24 kemarin kami di lapangan juga masih ditemukan, Pak Ketua, dan upaya untuk patroli juga....

KETUA RAPAT:

Bu Menteri, saya mau tanya, ini 3 tersangka anak buah atau pemilik modal atau cukong? Kalau cuma anak buah *enggak* usahlah, saya tidak perlu laporan itu. Saya maunya cukongnya yang tertangkap, itu *aja*. *Kan* saya berkali-kali saya katakan kepada Dirjen Penegakan Hukum ini.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Kenapa, Pak Roy?

Sedang pengembangan ke arah pemodal, Pak Ketua. Yang kena ini koordinator lapangnya. Jadi pengembangannya sedang terus dilakukan, termasuk yang kemarin juga minggu lalu ada, seminggu sebelumnya ada, kemudian kami juga kemarin waktu di lapangan juga menemukan lagi. Jadi memang Bukit Soeharto ini dan wilayah di IKN itu sedang terus dijaga dan sedang diintensifkan, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Dengan pikir kegiatan, penyegelan atau....

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Udah penyegelan....

KETUA RAPAT:

alat kerja, alat berat...

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Alat-alatnya ditarik, Ketua....

KETUA RAPAT:

Atau disita semua?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Kalau kami yang kemarin di lapangan semua yang ketemu itu alatnya langsung ditarik dijadikan alat bukti.

KETUA RAPAT:

Coba nanti *difotoin*, saya mau tahu

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Oh, bisa-bisa, ada, Pak, ada, Pak.

Pada prinsipnya penambangan emas tanpa izin ini memang begitu luas dan kelihatannya cukup luas dan kita sudah berupaya untuk bersama-sama dengan Inspektur Tambang sebetulnya, tetapi selama ini masih lebih kepada aspek kerusakan lingkungannya. Jadi KLHK yang lebih banyak turun ke lapangan.

Kemudian terkait dengan penggunaan dan pelepasan kawasan hutan, upaya penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan ilegal terus dilakukan sesuai dengan SK Menteri, kemudian sudah ada operasi pengamanan pemulihan

kawasan, kasus perambahan kawasannya juga sudah diproses hukum acara, delapan sudah kena denda administrasi.

Pak Ketua dan Ibu-Bapak Pimpinan yang kami hormati,

Seperti rapat kerja yang lalu terkait dengan tindak lanjut persoalan penggunaan lahan kawasan hutan secara illegal, itu ditindaklanjuti dengan pertama kita pakai *database* citra satelit, ini sudah kita bahas di Raker yang lalu. Kemudian kami melaporkan juga bahwa melalui Anggota IV BPK RI, KLHK juga bersama-sama BPK RI digacet tentang ini, Pak Ketua. Jadi ada di dalam *record* BPK ada 570-an perusahaan dalam catatan BPK, jadi kita bersama-sama. Kemudian di rapat kerja yang lalu juga diputuskan bahwa semua data dari gubernur, bupati, dan dari yang terhormat Anggota DPR Komisi IV DPR RI itu termasuk data yang di-*record* dan data yang harus ditindaklanjuti. Jadi ini dilakukan melalui norma UU CK dan PP 24.

Selanjutnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam percepatan rehab mangrove, Pak Ketua, saya mohon izin apa boleh....

KETUA RAPAT:

Eenggak, sebelum ke mangrove saya mau tanyakan dulu ini, karena yang kemarin ke Riau mengatakan KLHK tidak punya data valid, cuma berdasarkan citra satelit bahwa terjadi kebun sawit ilegal seperti contohnya di Riau. Nanti Pak Dedi bisa menanyakan secara langsung. Saya bingung, benar saya bingung. Kenapa saya katakan bingung? Luas hutan Indonesia sekian ratus juta hektar, *kan* cuma *ngomong*-nya. Kalau ditanya tunjukkan di mana tempatnya, catatan kebun ilegal, *eenggak* punya. Sekarang bupati banyak juga, mohon maaf ini, ada oknum bupati yang tidak mau melaporkan, ini *loh*. *Kan* seenak-enaknya ini. Maka saya bilang itu kayak kemarin kita itu kopi itu *kan* ini semua cuma dagelan, nyatanya hutan kita makin rusak parah *kok*. Tolong, Pak Dedi, ditindaklanjuti pertanyaan yang tadi ya. Saya mau data yang valid, bukan hanya asal-asal data. Jadi stoplah-stoplah retorika yang *eenggak-eenggak*. Seperti kemarin dari tanaman pangan saya bilang, "*Untung kamu eenggak saya usir*", saya bilang, "*Jangan nipu data lagi*." Saya ini bukan orang pintar, tapi saya *eenggak* bodoh-bodoh amat sebagai pimpinan. Maunya saya berkatalah jujur, ini seperti ini, ini bisa tidak tertangani, ini tidak tertangani, ini yang bisa tertangani, jangan hari ini *ngomong* A, besok *ngomong* B, besok *ngomong* C. Maka saya bilang sama anak-anak itu, sama staf itu, setiap rapat coba poin-poin penting ditulis, laporkan ke saya.

Pak Dedi mau tindaklanjuti dulu masalah ini sebelum ke gambut? Silakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Baik, beberapa waktu yang lalu, Bu, kita melakukan kunjungan ke Provinsi Riau dan di Provinsi Riau itu gubernurnya memiliki semangat yang tinggi untuk menangani perkebunan sawit ilegal yang perdebatannya *kan* sebenarnya tipis saja, 1,8 juta hektar, tipis hanya beda sekian ratus hektar. *Nah*, dan yang paling menarik adalah pada waktu kunjungan pertama, kita berkunjung ke Riau, kita

melakukan penyegelan terhadap areal kebun sawit ilegal yang berada di kawasan hutan, dan kita memiliki optimisme bahwa penyegelan tersebut akan memiliki implikasi yang cukup luas bagi mereka yang memiliki kebun sawit secara ilegal untuk *mikir* dua kali, untuk segera melakukan langkah-langkah pembenahan administratif, mendaftarkan diri, membayar denda, membayar PNBP sesuai dengan ketentuan yang belum disepakati sampai hari ini PNBP-nya *gitu loh*. Nah, tetapi pada faktanya bupatinya menyampaikan bahwa kebun yang disegel itu sudah bersertifikat. Pertanyaannya adalah dasar pengeluaran sertifikat yang dikeluarkan ATR BPN-nya dari mana? Ini *kan* dua lembaga negara *nih*, yang satu ATR BPN, yang satu Kementerian Lingkungan Hidup c.q. Dirjen Penegakan Hukum. Yang satu menyegel karena ini adalah sawit ilegal, yang satu mengatakan sudah mengeluarkan sertifikat. *Nah*, pasti *kan* pengeluaran sertifikatnya ada aspek prosedural yang terlanggar, pelepasan haknya bagaimana? Pembayaran ke PNBP-nya *kan* harus melalui Kementerian KLHK. *Nah*, kalau seperti itu, ini adalah pembelajaran penting yang harus dilakukan. Menurut saya Kementerian Lingkungan Hidup harus berani secara tegas melaporkan ke Mabes Polri bahwa pengeluaran sertifikat pada areal perkebunan sawit ilegal itu bertentangan dengan undang-undang, sehingga Kepala BPN yang mengeluarkan sertifikatnya diproses pidana. Karena saya khawatir bahwa ini terjadi di berbagai tempat, bukan satu sertifikat, bisa jadi ratusan sertifikat, ribuan sertifikat yang melibatkan jutaan hektar tanah dan negara dirugikan.

Kemudian dihubungkan dengan persoalan minyak goreng yang hari ini tidak langka tapi mahal, tidak langka *sih*, cuma mahal. *Nah*, *kan* kalau kita melihat data statistik bahwa CPO itu *kan* dilahirkan dari sawit, sawit itu *kan* secara umum itu *kan* menggunakan tanah milik kehutanan, baik yang sudah alih fungsi maupun yang ilegal. Saya katakan sekali lagi, baik yang sudah alih fungsi maupun yang ilegal. *Nah*, dalam perspektif ini saya bertanya, nanti penegasannya adalah Kementerian Lingkungan Hidup bisa *enggak* melakukan penekanan terhadap para pengusaha ini yang tidak memiliki nilai-nilai nasionalisme, yang lebih mengutamakan keuntungan yang lebih tinggi dengan melakukan penjualan ke luar negeri dibanding dengan dalam negeri padahal rakyat Indonesia itu memiliki hak yang kuat untuk menikmati hasil alam, diantaranya hasil areal perkebunan sawit yang menggunakan tanah negara. Ini *nih* yang titik fokus kita, sehingga yang hasil di Riau ini saya ingin meminta penegasan Planologi karena waktu itu *kan* punya kesanggupan, deretannya tanggal sekian, bulan sekian, hasilnya sekian, *gitu loh*, Pak. Waktu itu *kan* Planologi menyampaikan kesanggupan itu. *Nah*, nanti sudah sampai mana *nih* penanganan kebun sawit ilegal, kita fokuskan di Riau dulu, sudah berapa yang sudah tertangani dan sudah berapa yang menempuh prosedur formal administratif untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan agar negara ini tidak dirugikan. Terus yang berikutnya adalah berapa *sih* kesepakatan kita tentang PNBP-nya? Karena waktu itu *kan* kementerian menyampaikan 11 juta ya. Kita masih *debatable*, kita ada yang minta 20, ada yang minta 30, ada yang minta 50. Menurut saya harus disepakati dulu PNBP-nya berapa. Jangan sampai nanti sawit-sawitnya kemudian nanti sudah memiliki status *gitu kan*, hak gunanya, hak guna usahanya, tetapi PNBP-nya rendah membayarnya, negaranya rugi. Karena yang sawit ini, kemudian juga batubara, ini lagi untung-untungnya. Apalagi yang ilegal, untungnya *double-double*, *enggak* bayar pajak, *enggak* bayar PNBP, menikmati

CPO yang mahal. Batubara juga begitu, tidak bayar pajak, tidak bayar PNBP, menikmati harga yang mahal. *Nah*, ini yang saya sampaikan.

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Kanjeng mau menambahkan? Silakan.

F-P. GERINDRA (Ir. K.R.T. H. DARORI WANODIPURO, M.M.):

Terima kasih, Ketua.

Teman-teman sekalian yang saya hormati,
Bu Menteri, para Eselon I yang saya hormati,

Ini masalah ini saya kira mungkin bisa diselesaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak saling menyalahkan tapi fakta, Bu Menteri, bahwa di DPR Komisi IV ada dua Panja: Panja Kelapa Sawit dan Panja Penggunaan Kawasan Tidak Prosedur. Keduanya saya anggotanya, Panja Sawitnya, Bu Anggi, Panja Kelapa Sawit Ilegal, Pak Sudin. Jadi begini, Bu, bahwa untuk Panja Kelapa Sawit milik masyarakat kami ke Siak sama Pak Dedi dan ada beberapa teman. Ternyata yang dikatakan di Undang-Undang Cipta Kerja yang 5 hektar itu sangat sedikit, Bu, rata-rata itu di batas 5 hektar. Jadi itu buruh kerja yang ada banyak di sana. Kenapa? Setelah saya tanya wawancara sama masyarakat, "Ya *gimana*, Pak, satu hektar *kan* 50 juta, kalau 5 hektar 250 juta. Dari mana kami?" Jadi rata-rata itu ada yang menunggu. Ini tolong..., nah kita buktikan di lapangan yang katanya 5 hektar ternyata dibagi-bagi, Bu. Buktinya apa? Tanamannya seumur, berarti punya satu orang. *Nah*, ini nanti tolong ke depannya jadi masalah ya dan masalah kebun sawit rakyat itu kebanyakan di Sumatera, kalau di Kalimantan pada umumnya adalah pengusaha.

Yang kedua, kami mendampingi Ketua ke Riau pertemuan pertama dengan gubernur, ternyata gubernur ini mantan Kepala Dinas Kehutanan, mantan bupati dua periode dan gubernur. Jadi pada saat pertemuan di *airport* saya katakan bahwa pernah ada tim yang waktu itu turun ke sana, kebun ilegal di sana itu di Riau itu hanya 330.000. Malah saya dibentak gubernur, "Salah, Pak Darori, ketinggalan zaman data Bapak itu." Maksudnya sekarang yang ilegal di Riau 1,5 juta, ya, Pak Dedi, ya. 1,8, tapi yang sisainya itu mungkin yang sudah ini *gitu*. Jadi begini, Bu, setelah itu Pak Gubernur mengundang kita, "Silakan datang ke Riau, kami terima. Bupati akan ketemu dengan Kehutanan, Pertanian, dan Komisi IV." Akhirnya kami datang lagi ke sana, bertemulah di Aula Auditorium di Riau itu. *Nah*, terus ekspos masing-masing, tetap Pak Gubernur menyatakan di Riau ada 1,5 juta hektar ilegal. Bupati juga mengatakan bupati ini karena bupati baru merasa pintar. Akhirnya saya agak tersinggung, karena seolah-oleh Kementerian KLHK tidak pernah bekerja. Selama ini apa? Saya katakan, "Eh, jangan lupa, dulu waktu tahun 2011 sudah turun." Pak Gubernur *nyaut*, "Iya, *kan* saya sering ada Pak Darori di Kehutanan." Jadi data yang dulu, Bu, yang pernah ada itu masih valid di sana, sampai saya bilang sama bupatinya, "Kalau perlu tempat anda yang mau saya

periksa dulu di KPK." Sorenya bupati menemui saya,"Mohon maaf, Pak, bukan begitu." *Loh*, kita *kan* konkret.

Nah, habis itu kita ekspos. *Nah*, ini sudah ada kesimpulan, Bu, Komisi IV kesimpulannya antara lain yang pertama bahwa setelah ekspos Pak Dirjen Planologi, Dirjen Gakkum, bupati, dipimpin oleh Pak Dedi, yang pertama bahwa Dirjen Planologi tidak bisa menyajikan data per perusahaan, yang bisa hanya menyajikan poligon, kan begitu ya, Pak Dedi, kalau salah mohon dikoreksi. Dirjen Gakkum hanya melakukan denda pada pelanggaran-pelanggaran kebakaran, sedangkan yang melanggar ilegal kebun belum maksimal, ini intinya. *Nah*, yang kedua, gubernur, bupati minta dana untuk inventarisasi kebun ilegal. Saya katakana,"Dulu tanpa dana bisa." Apakah ini ke depan..., saya sarankan kepada Bu Menteri kalau seperti ini Kehutanan tidak akan ditanggapi oleh daerah. Kenapa? Bupati mengatakan,"Pak, kebun ilegal itu bukan tanggung jawab saya, semua kewenangan kehutanan ditarik provinsi, silakan ke dinas provinsi." Ini faktanya *kan gitu*, Bu, ya. Makanya saya pernah katakan kewenangan mengenai *illegal logging*, ilegal kebun, ilegal perambahan, kebakaran itu mestinya, Bu, ke depan dikembalikan lagi ke kabupaten. Kalau perizinan bupati merekomendasi pertimbangan teknis bupati rekomendasi dari gubernur izin di menteri, jadi dua-duanya *nyambung* itu.

Nah, selanjutnya seperti itu akhirnya Pak Dedi minta untuk Kehutanan karena di sana minta dana. Jadi saya minta, Pak Ketua, bahwa ini cermin ternyata di Riau yang dulu tahun 2011 ada 330.000 hektar sekarang 1,5 juta hektar ilegal. Dan pasti bupati tahu, Pak, karena ini di kampungnya, pasti tahu. Jadi tolong, Bu Menteri, kalau sistem dengan rapat seperti kemarin itu tidak akan ada..., tolong gunakan penegak hukum dibawa. Dulu saya juga dua kali *enggak* diterima, Pak, Bu. Gubernur, bupati, *wah... enggak* ada wewenang, Bu. Terpaksa saya menggunakan teman-teman di Bareskrim, Jampidsus, juga KPK dan dalam surat saya dulu juga saya agak keras kepada gubernur apabila bupati tidak hadir dalam ekspos, eksposnya nanti di kantor KPK, semua bupati datang, sampai gubernur heran-heran itu. Ini apa harus seperti itu lagi? Kalau seperti itu silakan, Bu. *Nah*, kalau ini seperti ini... Karena denda yang Ibu cantumkan di Undang-Undang Cipta Kerja itu ternyata ada masalah, Bu, pengusaha tidak berani membayar denda karena tidak punya alas hak, tidak punya alas hak. Yang kedua, bahwa dendanya itu di dalam lampiran, tidak masuk batang tubuh dalam undang-undang, Bu. Tolong ini..., Undang-Undang Cipta Kerja *kan* direvisi, tolong ini dimasukkan. Kalau Undang-Undang 41 Kehutanan, Undang-Undang 18 mengenai Perusakan Kawasan Hutan, Undang-Undang Konservasi, semua denda itu ada di dalam pasal-pasal itu sekaligus, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja di lampiran, di lampiran ini. Ini yang perlu diperbaiki. Makanya perusahaan pada takut. Apalagi sekarang kalau dia bayar denda sekarang tahu-tahu jadi barang bukti bahwa dia berlaku salah, itu jadi masalah, Bu. Ini tolong juga kami memberi masukan yang intinya saya kira ini *enggak* terlalu perpanjang, ada penugasan, karena Pak Dedi minta, Pak Ketua, bulan Agustus paling lambat sudah ada data semuanya ilegal, *kan gitu* ya, Pak Dedi, ya, kalau salah tolong saya nanti dikoreksi.

Selanjutnya, Pak Ketua, saya juga karena ini kemarin ada demo di sini, jaringan aktivis Indonesia minta tambang di Kaltim itu ilegal tolong segera diusut,

bahkan mengusulkan ke Komisi III dan Komisi VII ada Pansus. *Nah*, sebetulnya ini masuk ke kita, Pak Ketua, tapi ya silakan saja *gitu*, nampaknya Komisi III dan Komisi VII akan membentuk Pansus itu.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Darori, jaringan dari mana?

F-P. GERINDRA (Ir. K.R.T. H. DARORI WANODIPURO, M.M.):

Jaringan aktivis Indonesia.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Laporannya?

F-P. GERINDRA (Ir. K.R.T. H. DARORI WANODIPURO, M.M.):

Laporannya dia pertama minta tambang ilegal di Kaltim diusut. Terus yang kedua, minta Komisi III dan Komisi VII membentuk Pansus, intinya itulah *gitu*.

Nah, selanjutnya saya minta kepada Bu Menteri tolong inilah kita sama-sama, jangan kita berpolemik. Memang ada kekurangannya. Silakan saya kira bentuk tim, waktunya ada dan tindakan. Kalau memang secara baik tidak ada ya kita lakukan dan Ibu di lampiran undang-undang itu dendanya itu dari mana datanya? Mestinya denda itu dihitung dari mulai membawa alat ke hutan, merusak hutan, mengelola hutan, menebang hutan, membakar hutan, menanam sawit itu dijumlah dendanya diambil 50% -nya, di tengah-tengah, jadi tidak pro pemerintah, tidak pro rakyat, di tengah itu. Ini dendanya dari mana? Ada yang menanyakan ke saya *ngitungnya* dari mana? Ini juga saya tidak tahu, karena walaupun saya dulu ikut Panja itu, tapi pada hal-hal tertentu saya diminta untuk menyetujui *gitu*. Karena di DPR, Bu Menteri, ini beda dengan birokrat teman-teman di sana. Kalau di DPR ada 10 gelas kopi, 9 komisi fraksi bilang teh jadi teh, jadi teh, Bu. Jadi contohnya buaya, Undang-Undang Perikanan di voting di sini, saya hanya yang tidak setuju kalau buaya masuk Undang-Undang Perikanan. Tapi *kan* itu voting, kalah. Itulah salah satu contoh. Jadi mohon maaf, jangan sampai nanti seolah-olah kami tidak berbuat. Saya hanya menyampaikan secara teknis dan yang ada *gitu*.

Saya kira begitu, Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi tadi sudah mendengar 2011 tiga ratus ribu sekian, sekarang satu juta lebih, 1,5 juta, 1,8 nah anggaplah 1,5 juta, iya *kan*. Masa pejabatnya banyak *enggak* tahu, bingung juga saya ini. Tadi apa yang dikatakan Kanjeng benar, masa bupati *enggak* tahu ada kegiatan perkebunan. Yang masalah PNPB ini saya bingung, kalau hanya didenda cuma 11 juta sampai 15 juta. Kalau Kanjeng tadi

nanya saya dari mana hitungannya, dari langit, itu *aja*. Sekarang kita *ngomong* jujur, buka kebun, buka kebun 1 hektar di tanah yang bagus minimal 50 juta, minimal. Kalau tanahnya agak rawa bisa 60 sampai 70 juta. Anggap kita hitung 60 juta satu hektar ya, kerusakan lingkungan yang diakibatkan kebun ilegal kita hitung *aja* berapa tegakan yang di..., satu hektar berapa tegakan yang ditebang. Tadi dikatakan 50%, kalau saya *enggak* setuju, saya *enggak* setuju kalau 50%. 100% sekalian. Kalau tidak, tidak akan efek jera sampai kapanpun, sampai kapanpun mereka akan berbuat seperti itu. Karena apa? *Gampang*, saya kongko-kongko saja sama pejabat LHK, PNBP saya bayar 15 juta, Itu *gimana* caranya ini? Saya *enggak ngerti* ini, saya harus belajar ke mana ini kalau bicara 15 juta. PNBP, saya setuju 15 juta, tetapi dendanya harus 50 juta. PNBP anggap saja untuk memperbaiki lingkungan, dendanya adalah terhadap pelanggaran yang dibuat. Kalau tahu *gitu* dari dulu saja saya ikut *nyuri* hutan bikin kebun sawit, sekalian *kan*.

Pak Dedi mau sampaikan sedikit supaya lebih lanjut dimulai.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Baik.

Bu Menteri, saya hanya memberikan penegasan bahwa berdasarkan informasi yang didapat di lapangan dimungkinkan kalau nanti dilakukan pendataan, korporasi itu sudah berubah menjadi koperasi. Jadi korporasi-korporasi yang melakukan pembukaan lahan secara ilegal dan ditanami kebun sawit, itu berubah menjadi koperasi. *Nah*, kemudian kebun sawitnya sudah dibagi-bagi atas nama-atas nama semuanya dibagi-bagi di bawah 5 hektar, sehingga mereka terbebas dari denda dan terbebas dari pembayaran PNBP. *Nah*, ini yang harus cermat itu, sehingga kata Pak Kanjeng *kan* analisisnya gampang, ini kebunnya sama *enggak*. Kalau kebunnya sama satu hamparan ada 1.000 hektar berarti bukan koperasi, itu korporasi. *Nah*, untuk itu harus segera digandeng Menteri Koperasi, itu daftar koperasinya pasti baru, tiba-tiba dibikin koperasi, koperasi, koperasi. *Nah*, ini untuk menghindari berbagai hal.

Terakhir saja, saya titip pesan saja, Bu, karena kebetulan beberapa kali datang, itu masyarakat Gunung Ciremai itu memprotes jangan sampai pinusnya disadap, karena kalau sampai pinusnya disadap nanti orang masuk gunung secara terus-menerus yang berdampak pada kerusakan ekosistem. *Nah*, ini untuk segera mendapat perhatian.

Terima kasih, Bu.

KETUA RAPAT:

Ya, lanjutkan, Bu Menteri.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Pak Ketua, mohon izin, karena masih hangat, saya mungkin perlu merespon yang barusan kita diskusikan.

Saya melihat ada tiga hal yang menjadi persoalan dari yang dibahas ini. Pertama, terkait dengan tata ruang pelepasan dan HGU. Seluruh persoalan tentang pelepasan HGU dan tata ruang ini saya kira kita sudah tahu bahwa itu persoalan yang puluhan tahun dan/atau belasan tahun. Saya kira yang terhormat Pak Darori juga sangat tahu bahwa di waktu yang lalu kalau hutan sudah dilepas, *enggak* pernah diurus lagi, dimonitorpun tidak, dilepas saja. *Nah*, ini memang secara terus-menerus sedang diperbaiki, Di Undang-Undang CK juga ada dimuat bahwa kalau sudah dilepas dimonitor dan lain-lain, sehingga Bapak Presiden pada bulan Januari itu menegaskan bahwa kalau sudah dilepas, tidak produktif, dan masih hutan itu harusnya jangan, *enggak* boleh *diterusin*. Itulah yang deklarasi untuk pencabutan. Jadi kita sedang berusaha sebetulnya untuk ini. Saya juga memahami, mengikuti, dan merasakan bahwa ada persoalan tata ruang yang kami dengan Kementerian ATR makin harus terus-menerus melakukan koordinasi. Jadi yang ingin saya sampaikan di aspek yang pertama soal pelepasan dan HGU ini, ini kami sedang bekerja, Pak Presiden juga dukungannya kuat. Jadi kalau misalnya pelepasannya 60.000 tahu-tahu HGU-nya cuma 7.000, sisanya masih hutan, itu juga kita minta diadendum *aja* pelepasannya, Pak Darori, tarik *kembaliin* jadi hutan. Nanti kalau dia sudah tidak hutan atau terbuka, maka itu tergantung dari kebijakan investasi. Jadi memang ini akhirnya jadi beberapa menteri, itu bagian yang pertama.

Bagian yang kedua tentang PNPB dan denda ini rasanya *udah* hampir 2 tahun kita bahas tentang ini, Pak Sekjen, saya nanti akan mengecek lagi lebih dalam, Pak Ketua, tentang ini. Pak Sekjen, mesti *diberesin*. Tempo hari ada rencana untuk membahas detail rinci FGD dan lain-lain, tapi kayaknya belum jadi-jadi, nanti ini dialami lagi. Tadi Pak Ketua sudah mengarahkan kalau PNPB *udah* jelaslah, masuk akal. Tapi kalau soal denda mungkin itu yang harus dieksplor lebih baik lagi. Saya memahami itu, Pak Ketua, terima kasih.

Yang terakhir....

KETUA RAPAT:

Saya sudah *ngomong* ini setahun lebih permasalahan ini, setahun lebih sudah saya angkat mengenai PNPB. Nanti pada RDP, saya minta masukan ya cara penghitungannya 11 sampai 15 juta itu *gimana*. Pakai metode apa? Karena sekarang orang jarang pakai kalkulator, pakainya *handphone* untuk *ngitung*, pakai kalkulator *handphone*. Ya mungkin *handphone*-nya *hang*, mungkin. Maka kalau saya masih pakai tradisional, masih saya siapkan ini, beda kalau saya. Saya mau tahu metodenya seperti apa *ngitungnya* timbul 11 sampai 15 juta. Dalam RDP nanti itu diangkat itu, diingatkan.

Ya, lanjutkan, Bu Menteri.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Terima kasih.

Yang ketiga, terkait dengan data inventori. Yang selama ini kami sampaikan dan disampaikan oleh para Dirjen kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota itu sebagaimana norma maka memang yang kelihatan oleh KLHK adalah dengan interpretasi citra satelit. Sebetulnya itu bukan asal-asalan, tapi memang normal seperti itu. *Nah*, jalan keluarnya adalah tadi sudah diberi arahan, saya menangkap baik dari Pak Ketua, Pak Wakil maupun yang terhormat Pak Darori, kita harus melakukan inventori yang sangat dalam karena pada dasarnya verifikasi itu ada dua hal. Jadi verifikasi fisik dan verifikasi subyeknya, orangnya. Jadi kalau pakai *remote sensing* atau dari jarak jauh memang susah KLHK mengatakan bahwa ini ilegal atau apa. Jadi memang harus diinventori. Jadi kalau boleh saya kira dari arahan tadi memang harus ada..., kami akan..., dan mohon persetujuan kita kerja di Riau saja dulu, kita buat metodenya yang pas yaitu dari citra satelit, kemudian kita harus membuat satgas yang banyak mungkin, tim-tim lapangan KLHK yang banyak dan bisa disupervisi. Di sini juga kita bisa lakukan *second layer law enforcement*, Pak Roy. Jadi *enggak* hanya *nunggu* dari bupati harus langsung turun. Jadi dengan tim yang banyak kita coba khusus di Riau, sehingga nanti akan kelihatan semua. Jadi mulai dari poligonnya, periksa di lapangannya, persis mungkin seperti cara-cara Kunkernya Dewan, tetapi ini lebih rinci dan mungkin bisa lebih detail dan lama di lapangan, sehingga *moral hazard* seperti sulap-menyalap dari korporasi menjadi koperasi dan lain-lain itu akan bisa kelihatan. Jadi saya minta waktu dan mohon persetujuan kita buat KLHK buat tim dan nanti bisa disupervisi langsung, tapi kita *trial* di Riau, karena memang Riau yang paling banyak ya, Pak Sekjen. Saya kira itu untuk hal-hal yang selalu muncul dalam 1-2 tahun ini sampai dengan sekarang.

Pimpinan, saya mohon izin melanjutkan paparan, terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam percepatan rehab mangrove, nanti saya mohon izin, Pak Hartono yang menjelaskan ya.

Kemudian terkait dengan pencemaran lingkungan Danau Singkarak dari Kunker Dewan di Kabupaten Solok dan Tanah Datar di dalam data indeks kualitas air tahun 2021 tercemar sedang dan sebagian ringan dan beberapa kegiatan dilakukan seperti inventarisasi keramba jaring apung, kemudian identifikasi pencemaran domestik, dan juga pemberian pelatihan dan bantuan modal. Pimpinan, kami laporkan bahwa Danau Singkarak ini termasuk di dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dan kami mengikuti bahwa Pemda juga sudah melakukan penertiban, sudah ada SK Gubernur tentang penertiban keramba jaring apung dan ketika Dirjen turun ke lapangan untuk mempelajari dan melihat untuk pembuatan instalasi pengolahan air limbah ternyata memang di tepi danau ini, itu langsung jalan, langsung jalanan. Jadi harus naik ke hulu. Sekarang kami bersama-sama Pemda provinsi sedang melakukan pencarian lokasi untuk pembuatan IPAL tersebut. Di sisi lain direktorat jenderal..., itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal PPKL, Pak Sigit, dan di sisi lain Direktorat Jenderal DASRH juga sudah melakukan RHL, *eh...* siap melakukan RHL untuk tahun 2022 ini.

Selanjutnya, terkait dengan program Citarum Harum yang sudah beberapa tahun ini berjalan, ini dikoordinir langsung oleh Bapak Menko Maritim dan Investasi dengan Pemda Jawa Barat dan KLHK memberikan kontribusi pembangunan fasilitas pengolahan air limbah pada 26 lokasi dan telah menurunkan beban

pencemaran 271 ton BOD per tahun. Kemudian KLHK juga memberi kontribusi pemantauan kualitas air *online monitoring* di 23 titik dan pelaksanaan sistem pemantauan kualitas air limbah secara terus menerus dalam jaringan dari 14 industri, kemudian RHL juga di areal IPAPS 100 hektar, kemudian kegiatan kebun bibit rakyat, kebun bibit desa di 23 unit dan di 2022 nanti 28 unit, demikian pula distribusi bibit gratis dan koordinasi dengan Satgas Citarum serta Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Ada introduksi baru sebetulnya yang kami sudah lihat di Karawang, di Bogor, dan ada contohnya juga yang baik di Indramayu, ini pola ekoriparian ini sebetulnya baik. Jadi sungai yang panjang kalau *enggak* salah sampai 76 apa 96 Km begitu, itu bisa di sisi-sisi sungai yang busuk-busuk, yang kumuh dan lain-lain rusak, itu bisa dilakukan ekoriparian.

Selanjutnya, terkait dengan mitigasi bencana banjir dan longsor areal DAS, KLHK telah melakukan kegiatan RHL, insentif, bibit kayu di PTPN VII, kemudian kebun bibit desa di Cintamanik Garut, kemudian bangunan-bangunan konservasi tanah dan air seperti *gully plug*, kemudian pembangunan sipil dan sebagainya.

Selanjutnya tentang IKN, kami berterima kasih sudah ada juga....

KETUA RAPAT:

Sebentar, Bu Menteri. Balik lagi masalah danau tadi. Kenapa *sih* tidak ada koordinasi atau kerja sama sama Kementerian Kelautan dan Perikanan? *Kan* bisa. Nyatanya sebagian besar di Danau Toba yang dulu mungkin puluhan ribu keramba jaring apung, terakhir kita ke sana dari Kabupaten Kerawe itu sudah tidak ada kerambanya, tapi mereka menyiapkan bibit ikan yang baru. Jadi istilahnya orang boleh mancing, boleh jaring, tapi jangan pakai keramba. Karena apa? Pencemarannya *kan* sangat berat sekali. Maka dalam rapat kerja kemarinpun dengan Perikanan saya sampaikan Waduk Cirata Jati Luhur, Saguling, tiba-tiba ada fenomena apa ikannya mati sekian juta ekor. *Gimana* fenomenanya saya bilang sama Menteri Kelautan, sama Dirjen Budi Daya. Pertama, *overload*. Yang kedua, kalau kasih makan banyak *Insya Allah* cepat besar. Dia *enggak* tahu yang *kebuang* itu mungkin empat puluh persen ke bawah. Itu *kan* ammoniac. Jadi ubah dulu pola pikirnya para petambak keramba itu, bukan dikasih banyak itu menjadi lebih baik, tetapi tergantung kebutuhannya. Cobalah kerja sama sama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ayo kita duduk sama-sama. Misalkan tadi Singkarak atau apa segala macam. Danau Toba saya lihat sudah bagus sekali *tuh*, dua kali saya ke sana. *Re-stocking*-nya dijalankan, *iya kan*. Apa *sih* yang dibutuhkan untuk di sana? Misalnya bibit lokalnya apa, ikan bili-bili atau ikan apa. *Ikutin aja* yang begitu.

Pak Dedi mau menambahkan?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Baik, Bu.

Saya *ninggetin* yang tadi, Bu. Yang pertama, saya inginkan itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengumumkan secara terbuka

berapa kerugian negara yang ditimbulkan atas sawit ilegal yang sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun itu dihitung itu berapa dan diumumkan kepada publik agar menjadi perhatian publik. Kemudian yang kedua, *kan* negara itu punya jaringan *tuh*, polisi punya Bhabinkamtibmas di kabupaten di tiap desa, Kodam punya Babinsa, kenapa tidak kerja sama? Sehingga nanti seringkali ada istilah ini di-*back up* ini, di-*back up* ini, menjadi terbuka. Karena kalau tidak dibukakan pada publik nanti seolah-olah Kementerian Lingkungan Hidup itu bekerja sendiri, ketika turun itu *enggak* ada yang peduli, bahkan seringkali berhadapan dengan beberapa pihak. Ini adalah masalah nasional. Sampaikan kepada presiden bahwa negara dirugikan. Untuk itu, aparat penegak hukum harus bekerja, bukan hanya Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau *enggak* repot, bertahun-tahun rapat lagi, data lagi, rapat lagi, data lagi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Mau langsung dijawab tadi kerugiannya? Mau langsung dijawab? Bu Menteri, tolong dijawab.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Bu Menteri jawab *aja*.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Enggak, begini, Pak....

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Kita sampaikan saja pada publik ini negara rugi *nih* sekian ratus triliun. Masa negara tidak punya perhatian untuk bersama-sama, Kementerian Keuangan, Mabes Polri, begitu *loh*, Bu. Kalau perlu Panglima TNI ikut bersama-sama *nanganin*. Ini *kan* masalah negara *gitu*.

Terima kasih.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Pimpinan, ini sudah diolah sesuai dengan Undang-Undang CK Pasal 110A dan B dan PP 24. Sesuai dengan metode yang saya tadi katakan norma di undang-undang dan di PP, KLHK memang melakukan proses bertahap. Jadi yang *udah* ketahuan lokasinya, *udah* ketahuan subyeknya begitu, ini tahap satu 24, tahap dua 223 subyek hukum, tahap tiganya 50 subyek hukum, tahap keempatnya 208. Jadi ada di sini kalau dihitung kemungkinan dapatnya itu sekitar 44 triliun, tapi baru dari sekian subyek begitu. Tapi kalau seperti yang dimaksud Pak Dedi, Pak Bambang, yang terhormat Pak Dedi, dari awal sampai akhir memang harus dilihat secara keseluruhan tadi dengan catatan Pak Ketua bahwa ada sejak alat masuk, kerusakannya apa saja. Saya coba eksplor dulu, Pak, secara internal tentang ini.

Tapi sebetulnya indikasi angka dengan beberapa subyek hukum sebetulnya sudah kelihatan, karena timnya juga sudah kerja. Hanya saya melihat berarti timnya ini harus dieksplor lagi, bukan hanya memverifikasi dan menetapkan administratif, tapi termasuk inventori di lapangannya yang kita ambil contoh di Riau. Jadi dari situ sebetulnya nanti bisa kelihatan, Pak Dedi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Izin, Ibu pernah menyampaikan *enggak* paparan di Mabes Polri misalnya menyampaikan pada Kapolri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Ya, saya mengerti. Kalau yang soal kerja samanya kalau informal *sih* ada.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Biar cepat, karena ini masalah kerugian negara. Negara rugi *banget*, tanahnya diambil korporasi, dinikmati hasilnya, bayar pajak tidak, apapun tidak. Masa' ada beberapa orang di negeri ini kaya raya dengan waktu cepat sedangkan yang lain miskinnya sangat cepat.

Terima kasih, Bu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Terima kasih.

Kalau kerja dengan BPK RI sedang berlangsung, saya kira ini juga hub yang bagus, bisa jadi simpul yang baik BPK RI. Kalau koordinasi kerja dengan Bareskrim Polri ada sebetulnya, tapi pengumuman belum pernah. Jadi saya kira nanti kami coba eksplor saja, Bapak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Kalau saya *sih* memberikan saran agar ini menjadi perhatian publik yang kuat, Kementerian Lingkungan Hidup umumkan ada *duit* negara yang hari ini dinikmati oleh hanya beberapa korporasi, mengambil tanah negara, menggunakan menanam kebun sawit secara ilegal. Kalau tidak begitu tidak akan pernah menjadi perhatian publik *gitu loh*.

Terima kasih.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Baik, Bapak, kami perhatikan. Nanti juga mungkin bisa dieksplor lebih rinci di RDP, Bapak. Karena kalau datanya *sih* saya adanya per tahapan, nanti kita lihat. Baik, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi *gini*, saya putuskan yang pertama Kalimantan Tengah, saya kasih waktu 2 bulan untuk inventarisasi. 2 bulan kemudian setelah selesai lanjutkan ke Riau, saya kasih waktu 2 bulan. Masa' tidak bisa menggunakan staf yang di Eselon III, Eselon IV ke lapangan. Itu saja, nanti masukkan ke kesimpulan rapat. Yang pertama, mulai tanggal 1 April ya waktunya 2 bulan untuk Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah itu sudah jelas terjadi pelanggaran yang luar biasa. Yang dikatakan oleh kementerian belum ada yang keluar, nyatanya saya cek langsung berapa PT yang keluar, berapa puluh ribu yang keluar tanpa prosedur itu. Ayolah kita kerja samalah, kita bangun negara ini, bangunlah jiwa nasionalis kita sebagai anak bangsa. Malu saya *bener*, malu *bener* saya. Zaman dulu *aja* sebelum Ibu jadi menteri, tanya *tuh* Kanjeng, kami rapat sampai jam 11 malam memutuskan RTRWP Gorontalo, itu petanya saja bisa diubah, petanya bisa diubah, digeser. Saya masih ingat zaman itu Prakosa ngamuk di sini. Kami yang menolak tiba-tiba petanya bisa bergeser, betul ya, Kanjeng? Ini yang terjadi *loh*, tolong sekali lagi kerja sama yang baik. Kita ini bukan ngurus masyarakatnya, ini masalah besar sekali. Pak Wiratno hari ini pensiun. Tapi kalau waktu yang lalu kerjanya *enggak* benar meninggalkan legasi, Pak, ya, Pak. Bapak *kan* hari ini pensiun *kan*, Pak? Tanggal 1 pensiun *kan*?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Jangan dulu, Pak. Berapa hari, masih ada waktu.

KETUA RAPAT:

Enggak, kalau anda sebagai pejabat *track record* ke belakangnya jelek, tidak akan dikenang orang. Mungkin nanti kalau keluar ketemu orangpun disapa juga *enggak*. *Nah*, makanya yang seperti inilah. Saya juga berharap nanti penggantinya orang yang mengerti permasalahan konservasi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Yang sebaik Pak Wiratno.

KETUA RAPAT:

Ya manusia pasti bedalah, Kang Dedi. Paling tidak harus mengerti dan paham permasalahan. Jangan *ucuk ucuk ucuk* dari lain masuk *pluk, lah* itu seperti itu. Di sana sama *tuh, noh* selatan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Sebutin, sebutin di mana.

KETUA RAPAT:

Ya Kementerian Pertanian, orang *enggak ngerti* apa-apa jadi Eselon I. Tahu-tahu....

INTERUPSI F-P. GERINDRA (Ir. K.R.T. H. DARORI WANODIPURO, M.M.):

Ketua....

KETUA RAPAT:

Sebentar, Kanjeng.

Tahu-tahu tanggung jawabnya, haknya sebagai Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian mengeluarkan surat untuk rekomendasi *replanting* tidak perlu lagi di Kementerian Pertanian c.q. Dirjen Perkebunan. Itu siapa yang rekomendasi? Uang BPDPKS 140 triliun itu.

Ya, Kanjeng, silakan.

F-P. GERINDRA (Ir. K.R.T. H. DARORI WANODIPURO, M.M.):

Makasih, Ketua.

Jadi ini saya akan menyampaikan, karena di setiap saat Pak Ketua ini curiga sama saya begitu, seolah-olah menutup-menutupi begitu. Ini saya *enggak* menutupi, Pak Ketua, ini saya buka saja *gitu*. Karena Pak Ketua bicara Kalimantan Tengah, Bu Menteri, mungkin Bu Menteri belum punya data, pada saat kami turun ketua timnya saya, Anggotanya Bareskrim, Jampidum, KPK sebagai pendamping. Di Kalimantan Tengah itu ada 282 perusahaan kebun, Pak Ketua, luasnya 3.9 juta hektar ilegal, tambangnya 629, izin 3.5 juta. Pada saat itu dihitung oleh Badan Litbang kita, Dr. Fatoni, kerugiannya di Kalimantan Tengah 158 triliun. Jadi ini saya sampaikan. Ini Pak Ketua kadang-kadang kalau *nengok* ke saya curiga terus. Saya sampaikan apa adanya, Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, lanjutkan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Terima kasih, Ketua.

Saya mencatat tadi yang disampaikan dan saya sudah minta Pak Sekjen kita siapkan keputusan menteri untuk inventori Kalimantan Tengah dan Riau.

Saya mohon izin melanjutkan ini bagian terakhir dari tindak lanjut Kunker tentang IKN. Saya mohon izin melaporkan progres IKN. Saya berterima kasih sudah ada atensi dan sudah ada ke lapangan dari jajaran Komisi IV DPR RI dan saya juga berterima kasih yang terhormat Wakil Ketua, Pak Budi Satrio, juga mengikuti dari dekat dan memberikan catatan-catatan penting dan arahan. Saya mohon izin agak panjang sedikit soal IKN ini, sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang 3/2022. Di dalam undang-undang itu ada lampiran tentang peta lokasi dan juga ada lampiran tentang rencana induk ibukota negara. Terus di *screen* berikut kalau kita lihat wilayahnya kira-kira seperti ini di dalam citra satelit. Maka ada kawasan inti pusat pemerintahan kira-kira 6.671 hektar yang kecil ini yang garisnya merah kalau di gambar. Kemudian ada kawasan ibukota negara di 56.000 hektar yang biru. Kemudian..., *nah* ini tadi yang ini yang 56.000, kemudian ada yang 256.142. Kemudian ditegaskan tentang pendekatan ibukota negara sebagai *forest city* yaitu dengan pembentuk struktur ruang perkotaan, orientasi kehidupan masyarakat perkotaan, dan juga dengan arah pengembangan yang menjaga sustainabilitas. Terus, *dicepetin aja*, kemudian ini manfaat konsep *forest city*-nya. Yang penting sebetulnya dimensi-dimensi konsepnya itu. Terus, jadi ada dimensi lingkungan, dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, lalu dimensi tata kelola. Kalau lihat catatan ini, maka ada prinsip-prinsipnya. Jadi yang dimensi lingkungan prinsipnya konservasi sumber daya alam, pengelolaan sumber daya air, aman dari bencana, ekonomi hijau yang tadi Pak Ketua sudah menyebutkan tentang ekonomi hijau dan kami berterima kasih atas dukungan itu. Saya nanti akan merespon melaporkan pada bagian isu strategis pada bab berikut. Jadi ini sudah ditegaskan prinsip-prinsipnya. Kemudian, terus, ini sebagai gambaran catatan saja, sebagai bahan referensi. Tapi prinsipnya bahwa..., terus, setiap perencanaan mulai dari perencanaan pengembangan sampai rencana induk, sampai sekarang rencana tata ruang, dan rencana detail itu selalu dikontrol dengan kajian lingkungan hidup strategis. Jadi prinsip lingkungannya menjadi sangat kuat. Ketentuan-ketentuannya juga sudah ada di dalam undang-undang. Kita *screen* 22, sudah aspek lingkungan hidupnya, konsepnya dari aspek lingkungan dan lain-lain. Saya ingin melaporkan apa yang dilakukan oleh KLHK dan bagaimana kita terlibat di IKN ini. Pertama, penyediaan lahan ibukota negara dari kawasan hutan. Jadi kalau kita..., terus, kenapa jadi ke sini, tadi gambarnya tadi. Terus *dong*. *Enggak* bisa ya? Ini kenapa *screen*-nya? Saya ingin melaporkan, ini terus, terus, kenapa? Berat ya? Karena gambar. Jadi kawasan ini semula adalah HTI IHM, sudah dikembalikan kepada negara menjadi hutan produksi. Hutan produksinya sudah dikonversi menjadi hutan produksi yang sudah disesuaikan fungsi menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi sehingga siap menjadi kawasan IKN, kalau kita lihat gambarnya ini yang kecil. Yang siap untuk IKN, untuk kawasan inti pusat pemerintahan itu sudah siap 6.700, kemudian 42.000 itu sudah keluar dari konsesi. Jadi sudah bukan HTI lagi, jadi sudah hutan produksi yang dapat dikonversi.

Kemudian kalau kita lihat..., ini gelap sekali ya, kalau kita lihat yang bagian atas, di atasnya ini, 5.000 juga sudah ditarik dari perusahaan, dari HTI, sehingga semua sudah menjadi hutan negara, kemudian nanti di dalam prosesnya ada yang wilayah pembangunan, ada yang akan menjadi zona rimba. *Nah*, itu dari sisi penyediaan lahan. *Screen* berikutnya, ini sebagai data dan informasi bahwa ini gambarannya yang merah muda ini yang kita sudah sesuaikan dari HTI menjadi

hutan negara dan ini juga sudah yang di atasnya juga baru berproses. Ini tentu saja karena dia HTI yang sudah aktif dari tahun 1990-an dan sebelumnya adalah HPH, jadi sudah ada *logger* di situ, sudah berproses, sehingga hutannya sudah hutan monokultur begitu, dan di dalamnya masih ada sarana-sarananya HTI tersebut seperti *camp*, kemudian ada pelabuhannya, ada jalan, ada pelabuhan, dan itu kita *transform* menjadi perizinan hutan dulu, perizinan kehutanan. Jadi ada proses administratif di situ. *Nah*, ini yang sekarang sedang berproses dan ketika IKN sudah menjadi..., sudah memiliki dan sudah resmi memiliki Kepala Badan Otorita, maka proses ini akan kita lanjutkan sesuai dengan prosedur pelepasan kawasan hutan. *Nah*, untuk mengimbangi itu, terus, Bapak Presiden memerintahkan untuk dilakukan pemulihan hutan besar-besaran di wilayah IKN, caranya kita memulai dengan Persemaian Mentawir. Persemaian ini disiapkan seluruh luanya ini 121 hektar, yang wilayah hijau telur asin ini 32,5 hektar nanti untuk sarana persemaiannya dengan produksi nanti mencapai 15 juta sampai 20 juta bibit. Pada saat..., terus, pada saat..., terus, pada saat ini karena pembangunan harus berjalan diawali dengan pemulihan, maka sudah mulai dilakukan penanaman. Jadi sekarang sudah dilakukan penanaman. Nanti..., kemarin yang dengan para gubernur juga sudah ada di situ penanaman dari berbagai jenis endemik seluruh provinsi, ini simboliknya, tetapi nanti akan ada semacam kebun raya atau arboretum atau apapun namanya, itu belum diputuskan dan lokasinya apakah bergeser ke selatannya dan sebagainya, jadi akan menyatu menjadi semacam kebun raya.

Kemudian..., terus, terus, di IKN ini..., ini *enggak* bisa..., berat ya? Berat sekali ya? Di IKN ini dikhawatirkan ada orang utan di wilayah IKN ini. Survei lapangan sudah terus dilakukan, di wilayah ini tidak ada orang utan, yang ada di bagian selatannya. Tetapi ada catatan berbagai satwa dan juga flora fauna di situ, di sini ada datanya, yang untuk itu maka perlu dilakukan koridor satwa. Jadi dari hutan ke hutan itu satwanya tidak terganggu melewati yaitu di bagian sini, di bagian utara, dan di koridor selatan di bagian ini, ini sudah diidentifikasi dengan baik dan sekarang kita kerjakan. Kemudian bagaimana melakukan pemulihan hutan di kawasan IKN, terus, kita akan mengembalikan hutan alam Kalimantan. Jadi caranya kalau areal itu dibuka, misalnya pohon eucalyptusnya harus ditebang dan menjadi tempat bangunan, maka akan..., setelah bangunan dan sebagainya itu akan bersisian dengan penanaman-penanaman spesies alam. Itu juga yang ditanam yang *gede-gede* juga, yang 1,5 meter begitu dan apabila dia tidak termasuk areal yang harus dibuka untuk pembangunan, maka dilakukan penyisipan. Jadi terhadap eucalyptus yang umur misalnya 2 tahun, 4 tahun, itu diatur, diisi dengan tanaman asli, tanaman endemic. Jadi nanti si eucalyptus ini menjadi pelindung misalnya untuk Meranti, Sorea, dan lain-lain, maka nanti dia menjadi pelindung. Nanti kalau pohonnya besar dia menjadi hutan alam. Jadi dengan demikian kita mencoba melakukan rekayasa pengembalian hutan alam Kalimantan. Jadi memang tidak mudah, Pak Ketua dan Ibu-Bapak Wakil Ketua, serta Ibu dan Bapak Anggota yang terhormat. Tapi kami sudah bersama para Dekan Fahutan se-Indonesia dan kelihatannya *executable*, bisa dilakukan.

Bagian lain yang menjadi urusan Kementerian LHK adalah lubang tambang dan rencana pemulihan bekas tambang. Ini datanya untuk seluruh Kalimantan Timur itu kalau bukaan tambangnya kira-kira ada 154.000-an yang di kawasan IKN

ini kalau catatan kami sementara sampai sekarang 29.000. Tetapi memang kita sudah mengawali mencoba untuk mengecek dan melakukan uji coba untuk pemulihan di tahun 2020-2021 dilakukan, dan bekas-bekas tambang yang berair ini seharusnya juga bisa menjadi sumber air buat IKN. *Nah*, ini pH-nya sangat rendah, ini ada yang sampai 2,6, ada yang 3 juga, kira-kira pH itu kalau 3,5 itu air jeruk nipis itu kira-kira 3,5. Ini asamnya ada yang lebih rendah, lebih asam lagi dari jeruk nipis. Ini terus diidentifikasi oleh kementerian dan kegiatan lain yang menjadi tugas KLHK adalah melakukan pengamanan dan penegakan hukum. Jadi ini kami sudah mengerjakannya sekarang di lapangan, ini ada zona *high risk* yang merah ini, kemudian ini ada zona-zonanya medium dan sebagainya. Kalau kita lihat ini Tahura Bukit Soeharto kira-kira 64.000, yang merah ini 56.000. Ini langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Dirjen Gakkum, kita menyiapkan papan larangan zona 1, 2, dan 3 dan sekarang sudah dipasang di lapangan 60 papan.

Kemudian Pak Ketua yang kami hormati, dan Ibu-Bapak Wakil Ketua, serta Ibu-Bapak Anggota,

Kalau kita lihat petanya ini rencana tata ruangnya oleh BPN, ini ada wilayah yang gelap, ini hijau sebetulnya warnanya hijau gelap, ini nanti akan ditetapkan sebagai zona rimba. Jadi dialah..., terus, *nah* ini, ini nanti akan menjadi zona rimbanya, zona rimba inilah yang akan memberikan *land cover* (tutupan lahan) di dalam undang-undang itu mintanya 75%, tetapi Pak Presiden pesan ke kami, "Kalau saya maunya 80%", seperti itu. Jadi itu namanya *effort* (usaha). Pada saat ini *land cover*-nya baru 42%, jadi kita masih harus menyiapkan. *Nah*, untuk itu semua maka Kementerian LHK, kami telah menetapkan keputusan tentang Satgas untuk dukungan pembangunan IKN dan dengan 9 bidang tugas. Jadi pengendalian perlindungan kawasan, rehabilitasi hutan dan lahan, penataan kawasan hutan dan pemukiman, ini yang terkait dengan pemukiman, masyarakat adat, dan lain-lain. Kemudian khusus rehab mangrove, karena di bagian bawah itu di Teluk Balikpapan itu ada mangrove yang bagus yang harus dijaga terus, kemudian konservasi dan koridor satwa liar, lalu pengendalian Karhutla, kemudian pemulihan pascatambang dan juga administrasi dan aset. Itu kira-kira hal-hal terkait dengan tindak lanjut dari Kunker. Selanjutnya, Pimpinan, ini contoh-contohnya di lapangan, terus....terus ya. Ini tadi pohon yang kita sisipkan, ini eucalyptusnya jadi pelindung, nanti kalau pohonnya besar nanti eucalyptusnya juga akan mengalami klimakterik, dia akan menurun.

Selanjutnya izinkan kami melaporkan tentang Program Prioritas 2023 secara cepat yaitu dengan target pendapatan 5,268 triliun dan proyeksi belanja untuk kementerian sebesar 11,221 triliun. Ini rincian sumber-sumber pendapatannya dari DR, dari provisi, dari IUPH, dari penggunaan kawasan dan lainnya. Belanjanya diproyeksikan untuk dukungan manajemen 4,5 triliun, pengelolaan hutan berkelanjutan 5,138 triliun, kualitas lingkungan hidup 1,15 triliun, dan ketahanan bencana perubahan iklim 260 miliar, serta diklat vokasi. Jadi tema....

KETUA RAPAT:

Coba, coba mundur lagi, agak *jelasin* ini yang tadi, agak *jelasin dikit*. Nah ini *jelasin dikit, terangin dikit bisa enggak? Enggak bisa? Kecilin dikit, kecilin dikit lagi, udah, udah cukup*, dukungan manajemennya termasuk biaya perjalanan dinas bukan? *Enggak*, yang saya tanya termasuk perjalanan dinas? Kanjeng, sudah dapat info? Ini LHK ini untuk perjalanan dinasnya 1,2 triliun loh, 1,2 triliun 2021, luar biasa. Saya dapat laporannya dari seberang, makanya saya tahu. Saya *enggak* habis pikir *ngabisin* 1,2 triliun itu kalau dalam keadaan pandemi Covid-19 ini lumayan juga. Komisi IV cuma dapat 1 tahun 35 miliar, dipotong lagi, kemudian di-*saving* lagi, kurang lebih sekarang cuma dapat 23 miliar, termasuk perjalanan dinas ya, itu saja. Jadi silakan.

Terima kasih atas penjelasannya yang sudah disampaikan.

Kami persilakan Anggota untuk bertanya. Yang pertama Bu Anggi. Silakan, Bu Anggi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Baik, terima kasih.

Bu Menteri, tentang perencanaan untuk IKN, ini *kan* bukan kerja biasa ya, bukan kerja biasa dan tentunya harus pakai instrumen yang luar biasa juga, karena itu hutan dengan tanah yang pasti berbeda dengan tanah yang ada di Jawa, perlakuannya juga pasti berbeda. Jadi saya hanya mengingatkan saja untuk memastikan semua instrumen itu *proper*, tadi konsep-konsep yang sudah diformulasikan seperti ada yang awal tadi ya, Pak. Sebentar, saya buka, ini *kan* menarik sekali *nih* bahasannya tentang *forest city*. *Forest city* ini *kan* kalau misalnya dalam dunia hari ini, kalau misalnya jadi itu *kan* luar biasa Indonesia. Tetapi memang harus dipastikan instrumen, konsep yang dimensi dan konsepnya, dimensi dan prinsip konsep yang sudah diformulasikan ini benar-benar diukur untuk mencapainya. Tentu tidak mudah dengan paparan yang tadi ya, tidak semudah itu memang, pasti berliku-liku. Nah, tugas kita bersama-sama teman-teman dari Komisi IV juga akan terus mengawasi juga dimensi dan prinsip konsep yang sudah ditentukan, yang sudah dicanangkan itu benar-benar terwujud *gitu*, dan mungkin nanti kita di RDP atau di forum berikutnya kita minta secara detail, Bu Menteri, untuk memastikan segala dimensi dan konsep yang sudah ditentukan untuk yang menuju ke *forest city* ini benar terjadi, langkah-langkahnya seperti apa, menggunakan indikasi apa, lalu kemudian definisi operasionalnya seperti apa. Seperti itu.

Yang pertama, Ibu Dwi Ria, silakan.

F-P. GERINDRA (Ir. DWITA RIA GUNADI):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam Indonesia Raya,

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta seluruh jajarannya,

Izinkanlah saya Dwita Ria Gunadi, A-76, menyampaikan pertanyaan dan masukan mewakili dari Fraksi Partai Gerindra.

Bu Menteri yang terhormat,

Kalau sebelumnya yang menyampaikan ini adalah rekan-rekan Fraksi Gerindra yang lain, hari ini saya langsung menyampaikan dengan Bu Menteri. Dengan senang hati, Bu, karena kami sama-sama dari Lampung dengan Bu Menteri. Pertama-tama saya ingin menyampaikan hasil kunjungan Komisi IV ke Provinsi Riau, tapi tadi sudah banyak disampaikan oleh Pimpinan, juga ditambah oleh Pak Darori, ternyata selama ini KLH itu belum memiliki data identifikasi kepemilikan penguasaan lahan sawit di dalam kawasan hutan seperti nama, luas, dan kepemilikan. *Nah*, bagaimana hal ini bisa terjadi, Bu Menteri? Hal ini membuktikan bahwa KLH itu harus bekerja lebih serius, lebih bersungguh-sungguh, karena bisa memberikan keputusan yang maksimal. Keputusan-keputusan KLH ini melibatkan banyak pihak, banyak kementerian lain. Tadi disampaikan bisa juga dari Kementerian Kelautan, kemudian Kementerian PAN, kemudian ada Kepolisian, dan sebagainya. *Nah*, belum lagi masalah mitigasi bencana, Bu Menteri, banjir, longsor di areal DAS. Banjir masih terjadi di Kutai Timur, Malang, Cilacap, Banyumas, termasuk Lampung. Alih fungsi lahan konflik antara satwa liar dan manusia juga masih terjadi, gajah di Lampung masih, harimau di Sumatera, orang utan, buaya yang kita temukan hampir memangsa seorang anak, belum lagi pertambangan dan perkebunan ilegal, semua ini masih menjadi masalah kita bersama. Disadari atau tidak disadari oleh Ibu Menteri, hasil nyata bisa kita lihat bahwa penegakan hukum saat ini masih sangat minim, belum semua bisa kita lakukan. Mungkin hanya pelaku-pelaku saja yang mendapatkan sanksi, tapi belum kepada tokoh-tokoh utamanya. Bukan itu saja, dampak pembukaan lahan maupun penambangan ilegal mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar. KLHK harus bersungguh-sungguh dan komitmen dalam melakukan reaksi cepat dan penyelesaian konflik agar permasalahan ini bisa selesai dengan baik, kerusakan lingkungan hidup kemudian tidak menjadi meluas dan lebih berat, sehingga juga menjadi biaya lebih besar.

Kemudian, Bu Menteri, lokasi IKN bukan hanya tanah kosong yang dikuasai oleh negara, tapi ada tumpang tindih dengan masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya di alam. Fraksi Gerindra meminta agar penetapan kawasan hutan IKN dan penyelesaian konflik perlu dilakukan. Ingat, Bu Menteri, perlu dilakukan sebelum membangun IKN ini. Saya mendapat laporan kunjungan

reses Pak Wakil Ketua Komisi IV di kawasan IKN memperlihatkan tadi sudah disampaikan Pimpinan bahwa lokasi tersebut sebagian besar telah dikuasai izin-izin korporasi, baik sektor kehutanan, pertanian, maupun pertambangan. Kami ingin tahu bagaimana skema pembebasan lahan tersebut. Bukan hanya itu saja, Bu, ada tercatat 21 kelompok masyarakat adat yang mendiami kawasan IKN. Dalam kajian KLHS dan perencanaan IKN, masyarakat adat ini harus menjadi bagian dari pembangunan wilayah tersebut.

Selanjutnya, Bu, *problem* yang kita hadapi saat ini dalam wilayah IKN adalah ancaman mangrove pada hulu Teluk Balikpapan. Kita tahu keberadaan mangrove membuktikan sangat berperan penting untuk sektor perikanan, sumber makanan, pusat pertumbuhan berbagai jenis ikan dan udang, dan bukan hanya itu saja, mangrove berfungsi sebagai penyerap karbon, melindungi wilayah pesisir dari erosi, sedimentasi, maupun tsunami. Kami, Fraksi Gerindra meminta KLHK menyusun tahapan pemulihan dan rehabilitasi sumber daya alam di kawasan IKN tersebut. Mungkin itu saja, Ibu Menteri, yang saya sampaikan, nanti secara tertulis akan saya berikan.

Saya hanya menambahkan satu lagi, Bu. Fraksi Partai Gerindra juga meminta kepada KLHK untuk mengadakan program pendampingan terhadap masyarakat terkait pengolahan limbah, program bank sampah di setiap kota/kabupaten yang belum ada alat pengolahan limbahnya. Ini banyak sekali, Bu, di Lampung juga banyak sekali. Kalau Ibu lihat di kota itu sampahnya banyak, tapi dinas-dinasnya juga mengeluh tidak punya alat-alat untuk pengolahan, sehingga sampah berserakan di kota-kota Bandar Lampung. Dalam hal ini untuk program prioritas tahun 2023 agar lebih ditingkatkan khususnya terkait program pendampingan pengolahan limbah yang melibatkan masyarakat agar bisa meningkatkan ekonominya. Mungkin itu saja.

Terima kasih.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Waalaiikumsalam.

Selanjutnya Pak Daniel Johan.

F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Ya, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan, segenap sahabat Anggota yang kita cintai,
Bu Menteri beserta seluruh jajaran,

Ada beberapa yang perlu saya sampaikan sekaligus mem-*follow up*, Bu Menteri. Yang pertama adalah terkait dengan DAS Kalimantan, bagaimana perkembangannya khususnya DAS Kapuas. Karena sepertinya bahan yang disampaikan belum ada laporan mengenai tindak lanjut terkait dengan DAS kritis Kapuas, termasuk mungkin DAS kritis beberapa wilayah lain yang selama ini menjadi sumber hadirnya bencana banjir.

Yang kedua adalah pertanyaan kami mengenai sudah berulang kali mungkin ditanyakan oleh Anggota yang lain juga, tetapi ini sebagai penegasan bahwa pembangunan IKN itu menjadi proyek, mega proyek, bagaimana AMDAL dari ibukota tersebut. Tadi juga Pak Darori baru sampaikan sekarang Bukit Soeharto sudah terbelah oleh jalan raya, padahal Bukit Soeharto itu menjadi salah satu sumber air yang dipertahankan untuk wilayah Balikpapan dan Samarinda. Bagaimana itu diantisipasi, sehingga pembangunan IKN bisa berjalan tetapi tidak menimbulkan bencana nasional yang besar.

Nah, yang ketiga adalah kita sangat mengapresiasi, saya rasa dari seluruh program nasional yang sangat penting dan strategis itu kita bahagia itu muncul dari KLHK yaitu seperti program KBR dan program Bank Pesona, karena itu sangat riil memberikan efek holistik dalam konteks pengembangan ekonomi masyarakat, ekonomi lokal, dalam penguatan pangan lokal, termasuk pada saat yang sama dalam konteks menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, mengaktifkan meningkatkan kapasitas dari para peserta. Jadi buat kami program Bank Pesona KBR itu, program yang jitu sebenarnya, program strategis yang bisa menjadi contoh bukan hanya secara nasional, mungkin juga contoh bagi dunia, sehingga kita berharap program Bank Pesona itu bisa semakin dibesarkan ketimbang, bu, ketimbang, meskipun penting juga, ketimbang program-program bagi bibit, karena bagi bibit itu mungkin 50%-70% gagal *tuh, enggak numbuh*. Tapi kalau Bank Pesona itu kerennya adalah selain dibagi bibit ada perawatan, ada pelatihan, memastikan, sehingga dia berjalannya ternak bagian dari situ, sehingga ini perlu mendapat perhatian dari Pak Presiden langsung *nih*, terobosan KLHK sangat hebat sebagai program yang menjadi teladan, membuat kebanggaan nasional, bahkan bisa menjadi contoh bagi dunia, bagi negara-negara lain.

Nah, yang keempat, kebakaran hutan dan lahan di Kalbar mulai terjadi awal Maret ini, jadi mohon diantisipasi dan sekaligus mohon dukungan, Bu. Terima kasih karena sudah konsisten sangat membantu kami, termasuk membantu Dapil kami di Kalbar, bantuan dari KLHK bagi para pemadam-pemadam, termasuk pemadam swasta. *Nah*, untuk berikutnya mudah-mudahan dalam membantu pemerintah mengantisipasi kebakaran bisa ada bantuan untuk mesin pompa airnya ya, karena itu multifungsi. Pada saat banjir bisa berfungsi untuk mengatasi banjir, pada saat kebakaran bisa mengatasi untuk semprot, pada saat kekeringan mereka bisa dimanfaatkan untuk menyediakan air bagi masyarakat.

Demikian.

Terima kasih, Bu Menteri.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Walaikumsalam.

Terima kasih, Pak Daniel.

Selanjutnya Pak Hanan.

F-PG (Ir. H. HANAN A. ROZAK, M.S.):

Terima kasih, Pimpinan.

Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Bu Menteri dan Pak Wamen beserta jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang saya hormati,

Saya melihat ini sangat banyak sekali, sangat kompleks permasalahan yang dihadapi oleh KLHK ya. Tidak mungkin bisa diselesaikan oleh Bu Menteri dan jajaran sampai tahun 2024 nanti, sampai habis masa jabatan. Oleh karena itu, saya pikir perlu ada hal-hal yang menjadi prioritas penyelesaian, terutama terkait dengan yang dipersoalkan Komisi IV, terkait dengan lahan. Harus ada kita buat mungkin ya contoh-contoh pengambilan tindakan penyelesaian persoalan, kita mulai dari yang kecil mungkin seperti itu, Bu. Masalah kawasan hutan ini sebenarnya kalau saya lihat masalah pengawalan, penjagaan, adanya permasalahan terkait dengan perambahan, kemudian juga penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan yang bukan untuk kawasan hutan, itu karena kelalaian, bisa juga disengaja, atau juga penjagaan yang kurang ketat. Seperti sampai saat ini yang kita amati, yang kita ketahui bersama bahwa seluruh kawasan hutan itu misalnya kawasan konservasi, kawasan konservasi sudah ada yang menjaga namanya balai-balai di tingkat provinsi misalnya *kan*, begitu juga yang lain-lainnya, ada KPH. Tapi yang balai ini walaupun diberikan otoritas, diberikan kewenangan, kemudian ada dukungan logistik maupun pendanaan, namun ini perlu diperkuat ke depannya, terutama kalau dulu lagi aktif-aktifnya Polhut, saya kira walaupun ada perambahan, ada penggunaan kawasan hutan yang belum, yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, namun itu bisa kita tekan seminimal mungkin. Oleh karena itu, Bu Menteri, ke depannya ini supaya menjadi perhatian lagi, ini harus dijaga. Kadang-kadang waktu itu saya berpikir *udahlah* kalau dijaga kawasan hutan ini walaupun rusak, tidak ada yang masuk satupun makhluk di situ, itu jadi hutan lagi, Bu. Jadi tolong ini Polhut ini ke depan sudah banyak yang mau pensiun ini, sudah itu senjata-senjatanya juga mungkin sudah tidak pas lagi itu. Ini ke depan ini untuk 2023 saya minta Polhut menjadi perhatian.

Kemudian juga KPH, KPH memang diserahkan ke provinsi *gitu*, Bu, ya. Tapi ini tolong diperkuat lagi. Tidak mampu provinsi ini dan sepertinya bukan yang prioritas bagi provinsi. Jadi saya kira perlu intervensi. Mungkin Polhut ini, Bu, saya kalau boleh menyarankan Polhut ini tarik saja lagi ke kementerian, Bu. Tenaga polisi hutan ini kita Tarik lagi ke..., kita BKO-kan ke KPH atau ke instansi-instansi lainnya.

Kemudian terkait dengan perhutanan sosial, Bu, sejak zaman Pak Zulkifli Hasan saya kira waktu menteri sudah ada izin-izin untuk perhutanan sosial. *Nah*, ini akhir-akhir ini, Bu, mereka ini sudah berpikiran lain. Ini saya kira jangan dikasih kesempatan, Bu, sudah ingin minta pelepasan. Dia sudah jadi yang dia kuasai kemudian dia mengarah ke sana, bahkan saya lihat ada yang mendampingi, *mem-back up*. Kawan-kawan dari BPD ya mohon maaf ya, ada pertemuan-pertemuan yang *mem-back up* itu untuk mengusulkan ke Bu Menteri. Saya kira tolong, Bu, tidak usah diladeni urusan-urusan yang seperti itu.

Kemudian saya ingin bertanya juga terkait dengan tindak lanjut, Pak, ini dari Gakkum ya, tindak lanjut penutupan atau pengangsuran mulut tambang illegal, Pak. Pernah saya disampaikan sempat dianggarkan, karena covid tertunda. Ini tahun ini atau tahun depan apakah ini akan ditindaklanjuti. Kita buat contoh, saya sangat setuju itu, kasih contoh dihancurkan, mereka tidak mungkin lagi ke situ. Tapi kalau ditutup, dia masih mungkin masuk lagi ke kawasan itu. Kemudian khusus untuk IKN utamakan, Bu, walaupun gubernur se-Indonesia bawa tanaman endemiknya, tolong yang menjadi perhatian setahun, 2-3 tahun ini terkait dengan tanaman-tanaman endemik yang selama ini ada di Kalimantan Timur.

Saya kira ini dari saya.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Terima kasih, Pak Hanan.

Dari Demokrat, sudah kenalan sama Bu Menteri belum? Sekalian kenalan. Ini Anggota baru, Bu Menteri, menggantikan Pak Muslim.

F-PD (MOHAMMAD DHEVY BIJAK PAWINDU):

Terima kasih.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati,
Bu Menteri dan seluruh jajaran,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Sebelum saya melakukan beberapa penyampaian dan pertanyaan, izinkan..., karena ini baru pertama kali saya RDP bersama dengan Ibu Menteri dan seluruh jajaran dari KLH, saya atas nama Mohammad Dhevy Bijak Pawindu dari Fraksi Partai Demokrat menggantikan Pak Muslim yang sebelumnya saya di Komisi VI, kemudian bertukar dengan Pak Muslim di Komisi VI. Selanjutnya saya dari Dapil Sulawesi Selatan III, Bu Menteri. Selanjutnya terkait dengan Raker kita

pada hari ini, kamipun dari Fraksi Demokrat ingin menyampaikan beberapa hal dan kemudian beberapa pertanyaan.

Yang pertama, terkait dengan capaian indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2020 sebesar 70,27 dan terus mengalami peningkatan yang positif pada tahun 2021 menjadi sebesar 71,41. Namun demikian, target capaian indeks kualitas lingkungan hidup yang ditetapkan KLHK pada 2023 cukup rendah sebesar 69,48, bahkan lebih rendah dari capaian tahun 2020 dan tahun 2021. Hal ini tentu bertolak belakang dengan semangat Indonesia guna mewujudkan perbaikan tata lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan. Yang menjadi pertanyaan kami kenapa target pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2023 ini menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan kemudian apa kendala dan masalahnya?

Yang selanjutnya, terkait dengan IKN, Bu. Seperti yang disampaikan oleh beberapa pendahulu yang sudah berbicara, kamipun dari Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa pemindahan ibukota bukan sekadar pemindahan ruang kerja, tetapi pemindahan ruang kehidupan banyak orang. IKN ini berkonsekuensi pada kemungkinan pengelolaan sumber daya alam yang terus-menerus dan praktis akan mempengaruhi fungsi ekologis jangka panjang. Yang kedua, Fraksi Partai Demokrat meminta KLHK untuk serius dalam memperhatikan masalah lingkungan hidup akibat pemindahan IKN ini, seperti ancaman terhadap tata kelola air dan perubahan iklim, ancaman terhadap flora dan fauna seperti peningkatan konflik satwa liar dan manusia, serta peningkatan risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan atau *environmental sustainable development* perlu dilakukan dengan melibatkan kearifan lokal masyarakat setempat dan adat. Selanjutnya pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah menerbitkan PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Salah satu bab dalam PP 23 Tahun 2021 ini adalah mengatur tentang kawasan hutan dan pengelolaan khusus atau KHDPK. Bagaimana tindak lanjut atas implementasi kebijakan yang dimaksud, terutama tentang keberlanjutan usaha serta pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Perum Pertani?

Selanjutnya, berkaitan dengan bahan Raker hari ini, saya juga ingin menyampaikan beberapa kondisi yang ada di Dapil kami, Dapil Sulawesi Selatan III, Bu, seperti penyampaian Ibu Menteri tadi terkait dengan Danau Singkarak, Bu. Jadi Perpres Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional di mana di daerah kamipun juga ada salah satu yang masuk dari 15 Danau Prioritas yang perlu dijaga dan diselamatkan yaitu Danau Matano, Bu. Danau Matano di Kabupaten Luwu Timur di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan danau tektonik purba yang cukup unik di Indonesia dan sangat berpotensi menjadi destinasi wisata domestik bahkan internasional. Namun akhir-akhir ini di pinggiran-pinggiran danau sudah mulai tercemar oleh sampah, bahkan di tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan melakukan kegiatan pembersihan sampah sekitar Danau Matano yang di mana dalam sehari sampah bisa terkumpul atau diangkut sebanyak 27 ton dan jika terus dibiarkan akan terus meningkat. Yang ingin saya sampaikan terkait dengan pencemaran Danau Matano tersebut adalah agar kiranya melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan bisa memperhatikan dan menjaga 15 danau prioritas Indonesia, salah satunya itu Danau Matano ini di Kabupaten Luwu Timur, dengan upaya melakukan pengantisipasi terjadinya pencemaran agar tidak terjadi lagi demi menjaga ekosistem dan antisipasi bencana.

Selanjutnya terakhir, salah satu daerah rawan banjir bencana alam banjir dan longsor daerah kami adalah khususnya di Luwu Raya, Bu. Di Dapil kami, Sulsel III itu Luwu Raya terdiri dari tiga kabupaten satu kota yaitu Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, dan Kota Palopo yang sangat berisiko besar terutama di daerah aliran sungai, sehingga memang sangat penting dilakukan mitigasi bencana. Sebagai upaya antisipasi bencana banjir dan longsor di daerah aliran sungai, maka mitigasi bencana yang merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana mencakup upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung produktivitas dan peranannya dalam menjaga ekosistem penyangga kehidupan. Tidak lupa pula tentu edukasi terhadap masyarakat pemukiman di sekitaran daerah aliran sungai yang rawan terkena banjir di area kami.

Mungkin itu saja, Pimpinan.

Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Walaikumsalam.

Selanjutnya Ibu Yessy.

F-P. NASDEM (YESSY MELANIA, S.E.):

Baik. Terima kasih, Ibu Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi IV, Ibu Menteri yang kami banggakan beserta Pak Sekjen dan Eselon I dari KLHK,

Yang pertama dari Fraksi Nasdem kami ingin menanyakan sesuai dengan agenda kita hari ini, salah satunya adalah menindaklanjuti terkait kunjungan kerja reses ataupun kunjungan kerja spesifik Komisi IV. Tadi sudah beberapa dijelaskan oleh Ibu Menteri, memang pemaparan dan penjelasan Tapi ada satu lokasi yang tadi mungkin terlewatkan atau belum ada *report* ke Bu Menteri. Di Jawa Tengah, di Sukoharjo kalau tidak salah saya di Desa Gupit itu dengan PT RUM, waktu itu kita Komisi IV bersama-sama dengan..., kalau tidak salah Pak Roy juga ada bersama, *nah* itu seperti apa *update* dan penyelesaiannya yang sudah dilakukan oleh KLHK? Karena di sana kami menerima aspirasi bahwa masyarakat selain mendapat ancaman dari sisi kesehatan dan karena baunya sangat luar biasa, itu

terkait limbah pabrik dari PT RUM itu sendiri, dan yang kedua juga terkait dengan hasil produktivitas pertanian mereka juga menurun tentunya karena pengaruh dari air bersih itu sendiri. Kemudian yang ketiga, masyarakat di sana juga mengalami intervensi yang luar biasa, ada tindakan-tindakan yang mengarah ke kriminal untuk masyarakat setempat ketika mereka berbicara atau mem-*blow up* kasus ini. Jadi saya pikir hari ini kita, DPR bersama pemerintah juga masih sama-sama ingin untuk bisa eksis untuk bisa masyarakat percaya kepada lembaga kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini.

Dan yang kedua, dari Fraksi Nasdem kami mengapresiasi terkait cepat dan masifnya juga pembangunan IKN, begitu juga respon dari KLHK yang tentunya dengan arah kebijakan pembangunan memprioritaskan lingkungan hidup dan keberlangsungan hutan dan tadi kita juga mencatat bahwa dari Gakkum sudah menemukan dan menindaklanjuti tambang ilegal yang terjadi di Kaltim, meskipun mungkin saat ini masih sangat berat untuk membasminya secara sendiri karena ini perlu sinergitas dan soliditas yang luar biasa antar kementerian dan lembaga. Tapi KLHK dari aspek lingkungan hidup juga sudah kami apresiasi, dan kami juga terus mengawal dan mendorong bersama untuk bisa dicari sampai ke akar-akarnya, mungkin sampai ke pemilik modalnya.

Kemudian yang kedua, kami juga melihat bahwa pergerakan Ibu Menteri secara khusus, secara pribadi, melakukan diskusi juga secara masif dengan dekan dari Fakultas Kehutanan yang dianggap mungkin lebih banyak punya pengalaman riil di lapangan dalam bentuk *support* kerja untuk IKN kita, ini juga sudah luar biasa, sinergi seperti ini yang kami pikir perlu dipertahankan, perlu diapresiasi, karena masyarakat di sana juga butuh kerja sama, butuh komunikasi, koordinasi secara masif untuk pembangunan IKN. Dan juga kami mengapresiasi termasuk rehabilitasi mangrove tadi di Mentawir dan lain sebagainya, itu juga respon cepat dari KLHK. Jadi jangan sampai misi dari pembangunan IKN ini..., lestari dan hijau konsepnya itu harus berkesinambungan terus di lapangan, itu yang kami harapkan.

Dan yang terakhir, kami juga mengingatkan bahwa musim penghujan juga sepertinya sudah di ujung. Tadi Pak Daniel Johan dari Kalbar sudah mengatakan bahwa ada 20-an titik ditemukan *spot* api, kemudian di Sumatera Barat juga sudah ditemukan 20-an titik *spot* api. Kami hanya menanyakan dan mendorong untuk ada kebijakan-kebijakan, kemudian pemetaan secara massif, kemudian langkah mitigasi untuk menghambat lajunya nanti *spot* api ini ketika musim kemarau betul-betul terjadi.

Mungkin itu, Ibu, dari Fraksi Nasdem.

Terima kasih atas perhatiannya.
Selamat siang.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Terima kasih.

Selanjutnya Kakak Ansi.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih, Bu Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua,

Pimpinan yang saya hormati, juga Ibu Menteri, Pak Wakil Menteri, Pak Sekjen, Para Dirjen, Eselon I yang saya hormati dan banggakan,

Ibu Menteri, dalam jawaban tertulis yang kami baca, terutama yang terkait dengan data kawasan sawit ilegal yang sebesar 3,3 juta hektar itu, KLHK memberikan jawaban bahwa upaya untuk mendata dan menginventarisir terus dilakukan, dilakukan dengan dua pola. Yang pertama itu adalah sosialisasi kepada GAPKI, APKASINDO, dan Pemda; yang kedua bersurat kepada Kementerian Pertanian, Pemda, GAPKI, dan UPT. Namun, dalam jawaban itu ditulis juga hasilnya belum maksimal. Terus terang, Bu, pasti hasilnya tidak akan maksimal, karena pola kerja seperti ini masih pola kerja *business as usual*, sementara yang kita bicarakan terkait dengan data *sense of urgency*-nya itu belum terlalu kelihatan, Bu. Persoalannya ini adalah persoalan yang sungguh sangat luar biasa, *extra ordinary*, maka mestinya solusinya ataupun langkah yang diambil juga harus *extraordinary*, Bu, mungkin dalam tanda petik perlu ada target dan dalam tanda petik perlu ada daya paksa yang lebih kuat, Bu. Tetapi kalau hanya pakai pola yang *business as usual* seperti yang disebutkan dua pola di atas, saya pesimis data yang kita harapkan valid dan akurat itu bisa terjadi. Maka saya menyambut positif usulan konkret dari Pak Ketua, Sudin, tadi yang mengambil contoh di dua provinsi tadi, Kalimantan Tengah dan juga di Provinsi Riau dengan melibatkan konkret mungkin Gakkum. Karena kalau kita bicara di luar institusi KLHK, masih terkait dengan Undang-Undang CK, belum masuk kepada urusan pidana, kira-kira seperti itu. Itu poin yang pertama, Bu.

Yang kedua, Bu, terkait dengan di halaman 13 mengenai rencana pendapatan KLHK pada tahun 2023 disebutkan besarnya 5,268 triliun, ini umumnya didapatkan dari pendapatan negara bukan pajak. Sementara kalau kita lihat tahun 2022 ada kenaikan, tapi tidak sampai 2%, 1.9%, dan untuk tahun 2023 RAPBN KLHK itu disebutkan berkisar sekitar 11,221 triliun. Kalau kita lihat data pendapatan dan pengeluaran, ini bisa kita simpulkan besar pasak daripada tiang, Bu, sementara di sisi lain kita punya komitmen untuk menurunkan emisi karbon, Direktorat Jenderal PPI juga punya tanggung jawab untuk memerangi macam-macam *nih*, juga deforestasi dan seterusnya. Saya teringat dengan rapat kita beberapa waktu lalu, di situ juga Ketua Komisi kami, Pak Sudin, itu bicara menegaskan soal pentingnya mengeksekusi nilai gugatan sebesar 19,3 triliun itu, Bu. *Nah*, ini kaitannya dengan 28 kasus gugatan melawan perusahaan yang melakukan perusakan lingkungan hidup, Pak Dirjen Roy. *Nah*, ini ada angka ini kita ingin tahu kelanjutannya sudah seperti apa. *Nah*, angkanya sebesar 19,3 triliun, kalau misalnya ini bisa kita kumpulkan, *nah* ini *kan* akan menjadi hal yang positif, menjadi kontribusi bagi dana pengelolaan KLHK di tahun 2023 yang akan datang.

Yang berikut, Bu, terkait dengan pencemaran di Sungai Cikaniki, Kabupaten Bogor, Bu. Kasus disebutkan kasus pencemaran sianida. *Nah*, ini menimbulkan banyak ikan mati di sana, disebutkan korporasi yang melakukan aktivitas di sana itu adalah BUMN, disebutkan PT ANTAM di sana, Bu. *Nah*, kami mohon klarifikasi, mohon informasi terkait ini bagaimana, apakah KLHK sudah turun lapangan, sudah mendapatkan informasi, dan kerja konkret seperti apa yang sudah dilakukan.

Yang berikut terkait dengan dua perusahaan, Pak Wiratno, saya melihat Pak Wiratno bekerja cukup baik. Tetapi saya ingin bertanya terkait dengan PT Komodo Wildlife Ecotourism dan PT Segara Komodo Lestari itu di dalam jawaban tertulis ini juga disebutkan alasan evaluasi itu sifatnya hanya sekedar administratif, Pak, sifatnya hanya sekedar administratif. Yang ingin saya tanyakan apakah betul pembangunan yang dijalankan oleh dua perusahaan ini, walaupun belum dibangun, sepenuhnya itu sudah memenuhi kaidah-kaidah konservasi, sehingga menurut KLHK dari alasan konservasi itu sebenarnya tidak ada masalah, hanya alasan administratif semata ataukah juga sebenarnya kalau mau dikembangkan juga ada alasan yang sebenarnya lebih substansial daripada sekedar alasan administratif ini? Mohon penjelasannya, Pak.

Yang terakhir, terkait dengan agenda-agenda pemberdayaan masyarakat, pendampingan, dan pelibatan publik, Bu. Ya saya konkret saja di Direktorat Jenderal Perubahan Iklim itu ada kampung iklim. Kita ingin mendapatkan gambaran agenda pemberdayaan rakyatnya seperti apa, pelibatangannya masyarakatnya seperti apa. Yang kedua, Direktorat Jenderal PSLB3, Bu Vivin, barusan selesai ya buat acara besar di Bali. Kerja nyata setelah ini bagaimana, Bu, dengan target *zero waste* dan seterusnya? Kita ingin mendapatkan gambaran yang lebih utuh terkait dengan hal ini.

Saya kira itu saja, Bu Menteri, Pak Wakil Menteri, yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Terima kasih, Kakak Ansi.

Pak drh. Slamet, yang potong rambut.

INTERUPSI F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Saya tambah sedikit, sedikit *aja*.

Bu Menteri, konkret *nih*, Bu Menteri. Saya mau menyambung tadi yang dikatakan Pak Daniel Johan, Pak DJ. Kami berpikir kalau dibandingkan KBR sama Bang Pesona, lebih bermanfaat, mohon maaf *nih*, bukan berarti KBR tidak bermanfaat, tetapi efektivitasnya itu kami melihat Bang Pesona itu anggarannya

lebih kecil tetapi itu dampaknya buat rakyat itu lebih konkret, Bu. Bisa tidak Bang Pesona ini programnya *dinaikin* dari 50 jadi 100? Konkret.

Makasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Silakan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Baik. Terima kasih, Bu Ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pimpinan, Pak Ketua, Wakil Ketua yang saya hormati,
Anggota yang saya hormati,
Ibu Menteri beserta seluruh jajaran yang hadir yang saya hormati juga,

Ada beberapa yang ingin saya sampaikan, Bu Pimpinan. Yang pertama, saya menyambut tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua terkait dengan IKN. Kalau beliau tadi menyampaikan nanti di RDPU dijelaskan justru saya mengusulkan Bu Menteri itu dibuka di FGD, Bu Ketua. Saya pikir ini penting, kita harus melihat bahwa kemudian IKN dari awal PKS menolak itu adalah sikap politik kami. Tetapi begitu sudah diputuskan menjadi undang-undang, maka itu adalah mengikat bagi seluruh yang ada di NKRI. Tetapi dalam fungsi pengawasan secara konstitusional justru kami tidak ingin membiarkan itu. Pindah negara bukan sekedar pindah rumah tangga, bukan sekedar pindah kos-kosan. Oleh karena itu, ingin kita mendalami bagaimana konsep yang sudah disampaikan oleh Presiden dengan *forest city* itu kayak apa. Nanti kita ingin dalami, saya usul, Bu Ketua, Bu Menteri, ada di FGD, Bu. Kalau RDP nanti kita mungkin akan kurang fokus dan mungkin banyak hal yang mungkin kita diskusikan. Itu usulan saya.

Yang berikutnya, Bu Menteri, saya juga masih *concern* terkait dengan hutan, baik nanti yang IKN maupun saya kaitkan dengan *food estate* khususnya yang ada di Papua, Bu, kalau tidak salah itu *kan* sekitar 1,38 juta hektar yang akan dipakai menjadi lahan *food estate*. Apakah ini juga akan terjadi juga deforestasi lagi? Saya barusan melihat di grup Komisi IV ada hama belalang yang luar biasa. Saya jadi berpikir, di Sumba di Dapilnya Kak Ansi, kenapa itu bisa terjadi? Karena memang keseimbangan ekosistem sudah tidak terjaga. Burung-burung yang mestinya makan itu sudah punah karena hutannya sudah tidak ada. Saya khawatir dengan proyek IKN yang mungkin kita harus kawal... Makanya artinya kalau proyek itu jalan, maka hutan tidak boleh kemudian berkurang fungsinya nanti, sehingga saya berpikir jangan-jangan wabah ini atau hama ini akan berpindah ke Papua karena deforestasi terus berjalan kemudian juga di sekitar ibukota juga tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi. Oleh karena itu, saya ingin mendapatkan gambaran proyek *food estate* yang ada di Papua, apakah ini kemudian juga akan mendukung proyek deforestasi, sementara kita punya komitmen yang tinggi untuk

aksi perubahan iklim serta pembangunan yang kemudian ramah lingkungan dengan rendah karbon. Ini catatan saya, Bu Menteri.

Yang berikutnya, saya dari Dapil, Bu Menteri, sudah pernah saya sampaikan walaupun ini bukan ranah KLHK, tetapi paling tidak saya ingin mendapatkan gambaran sejauhmana sudah koordinasinya, yaitu di Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Gede Pangrango. Di situ ada Situ, Bu, yang disebut dengan Situ Gunung. Di situ sudah terjadi pendangkalan dan itu airnya dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di Sukabumi. Ketika kita tanyakan ranah untuk pendalaman itu ada di PUPR, tentunya ini sama-sama lembaga negara, sama-sama tinggal kemudian meningkatkan koordinasi, saya ingin mendapatkan gambaran, saya minta tolong bagaimana Situ itu yang pendangkalan kemudian dilakukan pengerukan kembali atas koordinasi antara KLHK dan PUPR.

Demikian, Ibu Ketua, yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Walaikumsalam.

Terima kasih, Pak Slamet.

Tinggal saya *sih* setuju ya kalau misalnya kita perdalam, karena memang dari kemarin, dari tahun lalu kita merencanakan untuk lebih dalam lagi. Apalagi ini isunya kemarin itu bukan termasuk IKN setau saya ya yang mau kita FGD-kan. *Nah*, ini ada tambahan isu, IKN ini mendesak menurut saya, jadi perlu kita dalami seperti yang jadi notifikasi saya di awal bahwa kita harus memastikan dan bagaimana kita mengukurnya, kita punya tanggung jawab bersama saya pikir ya, tidak hanya tanggung jawabnya KLHK dan beberapa aparat, semuanya punya tanggung jawab. Apalagi isu tentang lingkungan, itu tanggung jawab besar ada di pundak kita bersama, baik di KLHK, teman-teman di Komisi IV juga punya tanggung jawab untuk itu. Tinggal cari jadwalnya nanti, Pak Sekjen.

Selanjutnya Bu Vita.

F-PDIP (VITA ERVINA, S.E., M.B.A.):

Terima kasih, Bu Ketua.

Yang saya hormati Ibu Menteri, Pak Wamen, dan seluruh jajaran Eselon I, dan seluruh Rekan-rekan Komisi IV,

Saya..., *kenalin* dulu, mungkin agak lupa, saya dari Dapil Jawa Tengah VI, termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Magelang. Ini perlu tegaskan karena di situ di Kabupaten Magelang ada BUB dan KSPM di Borobudurnya. Mengapa saya

sampaikan di sini? Bahwa karena terkait dengan seluruh kementerian di Borobudur ini ikut andil tetapi ada beberapa hal esensi yang saya pikir masih terlupakan dan tidak terlalu terjangkau. Kemarin sekitar bulan Februari, saya sudah melaporkan kepada Bu Dirjen, Bu Vivin, terkait dengan adanya TPA Pasuruan ini yang sudah *overload* dan kemarin itu sudah sempat menjadi *jebol*. Ini tentunya akan mengganggu kawasan wisata nasional juga yang terkait kawasan nasional prioritas kita, terkait dengan pariwisatanya kalau penanganan sampahnya tidak baik. Jadi saya sungguh berharap ada perhatian terkait dengan TPA-TPA yang seperti ini yang *overload*, dan saya yakin banyak di beberapa tempat juga. *Nah*, saya kemarin melaporkan kepada Bu Vivin terkait dengan TPA tersebut sangat membutuhkan bantuan yang secara teknisnya sudah harusnya darurat, karena memang sudah *overload* dan kemarin *jebol* dan sangat mengganggu kawasan tersebut, sehingga saya mohon pada kesempatan kali ini agar dapat penanganan khusus untuk kondisi darurat di jangka pendek ini. Ada bantuan insenerator, baik itu 10 tahun atau 20 tahun ataupun hal-hal lain yang terintegrasi dengan KLHK. Karena di Kabupaten Magelang memang permasalahannya klasik, sama mungkin dengan di daerah lain yang terkait dengan lahan. Namun saya berharap dengan keadaan seperti ini ada secara teknis bisa langsung dilaksanakan dari Kabupaten Magelang. Itu perhatiannya, mohon dapat perhatian dari Ibu Menteri dan jajaran, khususnya dengan Dirjen PSLB3.

Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan juga terkait kemarin. Tadi Ibu Menteri juga sudah menyampaikan, Presiden juga sudah melakukan pencabutan IUP di 2078. Saya agak tergelitik. Memang kami tidak produktif. Itu ada daftar namanya apa tidak, Bu? Sudah ada daftarnya belum? Kita sudah dapat belum *sih*? *Oh* itu, adanya di ... (*suara tidak jelas*) oke. Saya ini tentunya terkait dengan proses perizinan juga. Tentu saya ingin mengamati di kawasan Kabupaten Magelang, khususnya di situ ada kawasan nasional, Pak Dirjen KSDAE juga sudah tahu beberapa ada yang melakukan aktivitas ilegal di sana khususnya di Taman Nasional Ngori dan Taman Nasional Keninger ya, Pak Wiratno? Saya mohon itu juga dilakukan penindakan yang tegas. Saya sudah telepon beberapa kali ke Pak Dirjen Gakkum dan memang mungkin masih belum. Karena ini kegiatan ilegal penambangan ini terus terjadi di daerah sana dan sangat mengganggu dan banyak mendapatkan kerugian material di masyarakat. Saya mohon perhatiannya terkait dengan itu. Terkait juga dengan proses penambangan, saya berharap ini ada kejelasan, ada mekanisme yang jelas, sosialisasi mungkin, karena untuk IUP sendiri yang karena terkait dengan Cipta Kerja, kemudian dengan UU Minerba yang baru, agak menyulitkan sepertinya untuk para perusahaan yang baru ataupun yang memperpanjang penambangan secara legal, sehingga penambangan ilegal di daerah semakin marak terjadi. Ada..., harus ada koordinasi yang jelas terkait dengan Kementerian KLHK, ESDM, PUPR begitu, dan juga BKPM, sehingga seluruh jajaran kementerian ini bisa berkoordinasi dengan baik terkait dengan proses mekanisme yang jelas tentang IUP ini. Ini agak menyulitkan karena di Cipta Kerja ini *kan* baru, sehingga saya *enggak* yakin apa sudah ada yang terbit, Bu Menteri, ya untuk perizinan-perizinan yang baru yang terakhir sekarang ini. Karena agak sulit soalnya ternyata prosesnya, agak sulit dicerna, ada beberapa yang masih harus bolak-balik seperti misalnya di ESDM harus duluan atau KLHK duluan. Saya sudah koordinasi juga dengan Dirjen PPI, Pak Rwanda, Planologi, ini masih belum *clear* terkait dengan mekanisme perizinan ini sendiri.

Mungkin itu dari saya, Bu, saya mohon perhatiannya.

Terima kasih, saya akhiri, terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Terima kasih.

Ibu Alien..., Ibu Alien dulu atau Kang Dedi dulu?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan dulu.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Bu Alien dulu, Bu Alien dulu.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Baik. Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi IV,
Yang saya hormati Ibu Menteri, Pak Wamen, Pak Sekjen beserta Jajaran Eselon
I KLHK,

Insya Allah kita selalu sehat walafiat dan dalam lindungan *Allah Subhanahu
Wa Ta'ala*.

Langsung saja, karena sering sekali kita melihat bahwa konsep dari rapat kita hari ini adalah isu-isu aktual dan juga rapat hasil dari kunjungan reses. Pertama, saya ingin menyampaikan, Bu Menteri, kemarin itu kalau *enggak* salah di Samosir ya Pak Sandiaga Uno itu resmikan Horas Samosir Fiesta 2022 dan Gedung Kreatif HUB, kalau *enggak* salah seperti itu. Tapi ternyata setelah dicek-ccek desa tersebut masuk dalam hutan lindung dan adanya izin-izin yang dilakukan oleh pimpinan desa dan juga PUPR, karena ini juga masuk dalam kegiatan PUPR, ini mohon dicek, karena di Desa Turpuk Limbong itu termasuk dalam kawasan hutan lindung. Kemudian permintaan dari masyarakat, mereka ingin Gakkum untuk turun melihat keadaan di sana dan sesuai dengan aturan Bu Menteri, karena kalau memang masuk dalam hutan lindung berarti sudah masuk dalam urusan KLHK. Ini mereka menyampaikan seperti itu dan saya berharap ini akan ditindaklanjuti, karena kalau memang seperti ini berarti tidak ada koordinasinya antara kementerian satu dan kementerian lainnya. Untuk saya seperti itu, Bu Menteri.

Kemudian tadi sempat teman-teman yang lain sudah menyinggung soal data. Saya ingin pertegaskan lagi, karena Raker kemarin kami sudah menyepakati

dan sudah masuk ke kesimpulan bahwa pemerintah dalam hal ini adalah KLHK dan juga DPR Komisi IV akan melakukan koordinasi dengan kabupaten atau provinsi yang memiliki izin untuk pelepasan kawasan hutan yang bermasalah, dalam hal ini kami *ngambil* subyek sampelnya ada di beberapa provinsi yaitu ada di Provinsi Sumatera Selatan, kalau *enggak* salah masuk juga Kaltim, Sulawesi Tenggara dan juga beberapa provinsi lainnya termasuk Riau. Bu Menteri, saya ingin menyampaikan bahwa memang banyak sekali ternyata setelah kita turun ke lapangan adanya izin tumpang tindih, Bu Menteri, dan ini sering terjadi. Saya berharap di tahun 2022 ini izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ini walaupun sudah direkomendasikan oleh gubernur misalkan, karena memang hasilnya pasti rekomendasi dari pimpinan provinsi atau gubernur, tolong dilihat dan ditinjau kembali, karena kadang yang direkomendasikan oleh gubernur atau pimpinan daerah itu hanya mementingkan unsur-unsur bisnis dan ini sangat merugikan masyarakat yang ada di tempat-tempat tertentu yang direkomendasikan oleh pimpinan daerah.

Kemudian soal mangrove, Bu Menteri, kalau memang seandainya KLHK fokus dengan mangrove, saya berharap daerah-daerah wilayah memiliki potensi mangrove menjadi potensi mangrove itu prioritas untuk dilihat, karena setelah saya turun ke lapangan saya melihat bahwa ternyata untuk penanaman mangrove itu kembali tidak gampang, tidak mudah. Apabila seperti ini tolong dilihat kembali atau ditinjau kembali masalah mangrove. Ada beberapa habitat yang termasuk dalam unsur mangrove tersebut. Ternyata kalau kurang atau lebih atau bagaimana, mangrove itu tidak akan tumbuh dan akhirnya mati, Bu Menteri. Kenapa demikian? Saya juga baru belajar kemarin.

Saya ingin menyampaikan kembali tentang ini sahabat saya yang terakhir *nitip* tapi dia sudah pergi *ninggalin* kita, dia menyampaikan ke saya bahwa tentang BDPKS penggunaan penganggarannya, terus kemudian untuk DAS, Bu Menteri, DAS ini juga sangat penting, karena memang... Ini sekarang sudah diganti ya Dirjenya, Bu Menteri? Apa masih? Bu, nanti saya minta data dari perusahaan-perusahaan, *kan* ada itu, Bu, untuk DAS, *kan* itu untuk perbaikan daerah aliran sungainya. Karena setahu kami waktu tahun 2021, kami meminta memang ada beberapa perusahaan yang tidak melakukan DAS itu. Jadi saya mohon tolong nanti diberikan datanya kembali dan kita ceklis mana-mana saja yang sudah melakukan itu.

Kemudian, Bu Menteri, saya ingin menyampaikan bahwa di Riau itu koneksi untuk pelepasan kawasan hutan, khususnya di bidang kelapa sawit itu sesuai data yang Bu Menteri kasih di Raker kemarin dengan data yang kita miliki itu memang ada perbedaan dan ingin kami pastikan kembali sesuai dengan apa yang Pak Dedi sampaikan bahwa kalau seandainya mereka untuk membentuk badan sendiri, korporasi sendiri, di daerah atau dataran yang sama, apakah itu ada peraturannya yang misalkan walaupun berbeda tetapi *basic* intinya, Pak Sekjen, orangnya sama, misalkan seperti itu, satu. Maksudnya *gini*, Bu Menteri, atas nama koperasi, atas nama koperasi masyarakat, izin yang dikeluarkan itu di hamparan yang sama, tapi apakah kita bisa menjamin bahwa di hamparan itu satu orang punya walaupun atas nama koperasi yang berbeda? Karena itu menjadi pertanyaan yang panjang juga, iya. Jadi kita minta kepastian verifikasi perizinan verifikasi datanya,

karena ternyata katanya bisa lebih koperasi yang dibentuk tapi ternyata pemiliknya satu orang saja. Saya untuk menekankan itu saja.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas penjelasannya, Mbak Alien. Sudah dijelaskan lebih banyak tadi, Mbak Alien.

Pak Dedi mau *ngomong*? Ya, silakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Ada tiga hal, Bu Menteri, yang...

KETUA RAPAT:

Habis itu Pak Budi ya.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Ya.

Yang ini harus mendapat fokus kita. Yang pertama adalah bagaimana kelanjutan dari PT Atlasindo yang ada di Karawang yang ada dua izin yang berbeda. Yang satu Dirjen Penegakan Hukum melakukan penutupan, penindakan, yang satu Planologi memberikan izin. Yang kedua, serius dulu ini Pak, ya. Terus kemudian yang kedua bagaimana tindak lanjut hasil kunjungan Komisi IV DPR RI ke Bengawan Solo yang ada perusahaan yang memakai pipa, kemudian membuangnya ke Bengawan Solo melalui saluran sungai kecil-kecil yang mengganggu petani, menimbulkan bau bagi masyarakat? *Nah*, kemudian yang berikutnya adalah saya ingat betul, Pak Wamen, saya dengan Pak Darori berdua waktu itu, berdua sama satu Pak Khalid ya, Pak Darori?

F-P. GERINDRA (Ir. K.R.T. H. DARORI WANODIPURO, M.M.):

Pak Bambang.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Sama Pak Bambang pergi ke Kalimantan Tengah merespon apa yang terjadi yaitu hutan yang dipertahankan oleh masyarakat adat untuk tetap ada dan lestari karena di situ ada pohon-pohon yang usianya ratusan tahun yang diantaranya Pohon Sonokeling. Kemudian ada pembabatan yang dilakukan oleh PT Sawit Mandiri Lestari yang memiliki izin Nomor SK 1 PKH PMPN Tahun 2019, luas yang dimohonnya 19.091 hektar, yang diberi izinnya 11.956 hektar. Pada waktu itu kita menginginkan agar hutannya tetap dipertahankan, karena

perusahaan ini sudah merupakan perusahaan raksasa yang menguasai hampir seluruh..., yang menguasai beberapa wilayah areal perkebunan sawit di Kalimantan Tengah, walaupun memang keinginannya masih sangat tinggi, ingin menguasai ratusan ribu hektar. *Nah*, apa yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terhadap keinginan warga tersebut? Karena bagaimanapun warga di sana sudah hidup lebih dulu dibanding perusahaan, bahkan kita harus punya rasa malu sebenarnya warga mempertahankan habitat lingkungan hidupnya demi kelangsungan anak cucunya, sedangkan kita memberikan izin kepada yang lain, habis itu setelah diberikan izin ditambah izinnya, luasannya. *Nah*, ini *kan* harus menjadi fokus kita utama di mana *sih* letak keberpihakan kita pada penduduk lokal, kalau kita bicara di mana keberpihakan kita kepada kaum pribumi misalnya kalau *ngomong* pribumi, yang disebut pribumi itu adalah orang yang tinggal di habitat itu selama turun-temurun dan hidup di arealnya tanpa menebang pohon, tanpa merusak hutan, tapi dia hidup sejahtera dan bahagia. Kemudian ketika dibabat pasti akan ada *problem*, bahkan sebelumnya *kan* ada dramatisasi, ada penangkapan tokoh adat dan sejenisnya dan itu menjadi perhatian kita, sehingga kita pergi ke Kalimantan Tengah, *nah* sehingga ini menjadi fokus kita agar tidak terjadi lagi di tempat lain. Untuk itu, saya mohon pada Pak Ketua, bisa *enggak* ini masuk dalam kesimpulan kita menjadi titik fokus sorotan kita untuk dilakukan pengkajian secara mendalam terhadap *problem* yang dihadapi oleh masyarakat adat dan semakin kuatnya cengkeraman korporasi terhadap berbagai kebijakan yang terjadi, khususnya pemberian izin, walaupun di sini izinnya adalah izin hutan produksi. Kalau izin hutan produksi, Pak Darori, harus ada lahan pengganti *enggak*? Harus ada lahan pengganti. *Nah*, kalau lahan penggantinya di mana kalau ini hutan produksi? Barangkali itu saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Nanti tunggu jawaban dulu baru saya pikirkan apakah dimasukkan kesimpulan atau tidak. Ya kalau masalah pengganti *kan* tinggal *nunjuk aja*.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Sebentar, Pak Ketua, saya mau sampaikan. Yang disebut dengan lahan pengganti tinggal *nunjuk aja* bagaimana? *Kan* harus dibebaskan, harus dibeli.

KETUA RAPAT:

Nanti dengar *aja* jawabannya apa.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Bukan main-main *gimana*, ya *enggak* mungkin, *kan* harus ada prosedurnya menggantinya di daerah mana, luasnya berapa, nilai pembebasannya berapa, *kan* harus begitu. Masa tinggal *nunjuk* ini tanah ini *dibebasin nih*, milik PT ini, ini gantinya di sana, ditunjuk hutan lain, *kan enggak* mungkin begitu. Negara kayak main-main, *gimana sih*.

KETUA RAPAT:

Pak Wamen sudah senyum-senyum saja *tuh* lihat. Ya, Pak Wamen, nanti kita tunggu saja jawabannya apa.

Pak Budi ada yang mau disampaikan? Silakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih, Pak Ketua.

Para Pimpinan dan para Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Bu Menteri, Pak Wakil Menteri, jajaran Eselon I KLHK yang saya hormati,

Saya sedikit menanggapi saja tadi beberapa informasi dan kajian yang telah disampaikan oleh Bu Menteri dan saya memperkuat beberapa catatan saya pribadi berdasarkan tinjauan ke lapangan yang kita laksanakan bersama minggu lalu.

Bapak-Ibu sekalian,

Sebagai informasi saja, ketidakhadiran saya salah satu alasannya minggu lalu adalah saya keliling di ibukota nusantara bersama KLHK dan juga para guru besar Fakultas Kehutanan se-Indonesia. Kami banyak melaksanakan diskusi cukup panjang selama 2 hari tentang rencana pembangunan ibukota negara ini. Saya tekankan sekali lagi, Bapak-Ibu sekalian, bahwa seperti saya sudah kemukakan di banyak forum sebelumnya, pemindahan ibukota negara ini adalah kesempatan untuk kita bersama-sama memperhatikan dan membangun suatu area dengan cara yang baik dan benar dan yang lebih penting bagi saya adalah kesempatan untuk melaksanakan rehabilitasi atau restorasi terhadap kawasan lahan hutan yang sudah hampir tidak ada atau yang tinggal sedikit. Karena memang ini adalah daerah pemilihan saya dan saya merepresentasikan masyarakat yang ada di Kalimantan Timur, khususnya mereka yang selama ini juga masih tinggal di dalam dan sekitar kawasan IKN. Tadi beberapa poin yang sudah Pak Dedi kemukakan saya rasa juga menjadi prinsip untuk pembangunan IKN ini.

Bu Menteri, Pak Wamen, dan jajaran Eselon I,

Seperti yang saya katakan ini adalah kesempatan untuk mentransformasi dan merehabilitasi ya. Saya kemarin melihat dan meninjau rencana ke depan untuk mentransformasi sebuah lahan yang tadinya adalah hutan tanaman industri bagi rekan-rekan yang mungkin belum pernah melihat HTI itu seperti apa, saya rasa memang ada kemauan teman-teman untuk kembali ke Kaltim untuk meninjau, ini saya rasa menjadi hal yang baik. Tapi HTI itu di mana biasanya satu jenis monokultur di mana memang ditujukan untuk kebutuhan industri tertentu. Di daerah yang tadi dijelaskan oleh Bu Menteri adalah daerah PT IHN atau Itci Hutani Manunggal selama ini menjadi tulang punggung industri bubur kertas untuk *pulp and paper*, April Group. Tapi dengan pemindahan IKN ini HTI mereka tadi sudah dijelaskan oleh Bu Menteri sudah juga melalui proses pelepasan melalui HPK dan

akan ditransformasi sebagian besar yang tadinya HTI satu jenis monokultur itu antara Eucalyptus atau Akasia menjadi hutan alam tropis. Ya, ini kemarin kita di lapangan juga melihat teknik-teknik yang akan digunakan, akan diterapkan untuk mentransformasi, untuk mengembalikan hujan tropis ini dan saya akui saya sudah pernah melihat model-model seperti ini dan saya tentunya saya mohon apresiasi dan saya punya..., ini harapan besar kita semua. Kalau ini sukses, saya katakan lagi ini kesempatan, moga-moga harapan kita bersama ini bukan cuma terjadi di Kalimantan Timur atau di ibukota negara, tetapi di provinsi-provinsi lain yang juga mengalami turunnya degradasi hutan yang besar saya rasa pola-pola seperti ini harus dicoba, harus dieksekusi. Tantangannya seperti tadi juga sedikit dijelaskan secara teori ini sudah baik, *nah* eksekusi implementasi di lapangan akan seperti apa.

Berikutnya tantangan yang juga saya sudah sering kemukakan di rapat-rapat, tadi sudah disentuh oleh Pak Darori mengenai masalah pertambangan ilegal. Saya apresiasi Dirjen Gakkum yang sudah menindak tiga atau empat pelaku tambang ilegal di sekitar IKN, di Bukit Soeharto kalau saya tidak salah. Tetapi ini bukan satu-satunya, Pak Dirjen. Saya juga melihat kemarin saya lewat pos Gakkum yang dibangun di daerah kawasan IKN, saya minta ini ke depan peran Gakkum ini salah satunya ini, juga mendorong pembuatan pos-pos Gakkum di daerah yang rawan, bukan cuma di IKN tapi juga di kecamatan-kecamatan lain di Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Marangkayu, dan mungkin di provinsi-provinsi lain yang memang rawan terjadi praktik-praktik seperti ini. Jadi, Pak Dirjen, saya terima kasih. Tapi saya tekankan di sini kerja Bapak masih banyak dan kita akan sama-sama awasi, moga-moga ini nanti lebih banyak lagi pos-pos seperti ini, Pak Dirjen.

Kemudian tadi saya juga ingin menanggapi IKN dalam perspektif keanekaragaman hayati. Kita sudah mendengarkan penjelasan Bu Menteri tadi mengenai pola pembangunan yang akan dijalankan, tadi saya sentuh mengenai restorasi atau rehabilitasi hutan industri menjadi hutan alam tropis. Ya, kita lihat daerah ini memang banyak hutan sekunder ataupun semak belukar dan tadi hutan tanaman. Kita tunggu nanti implementasi tim yang akan dijalankan untuk mengembalikan hutan alam yang ada di Kaltim. Kita bayangkan ya hutan-hutan ini tidak bukan lagi hutan monokultur, tapi benar-benar dibangun untuk mengembalikan hutan alam tropis dan mengembalikan ekosistem keanekaragaman hayati yang kaya di Kalimantan Timur. Ingat, Kaltim ini adalah rumah bagi banyak sekali satwa, flora, dan fauna keanekaragaman hayati yang begitu luar biasa, orang utan, pesut Mahakam, bekantan, spesies-spesies endemik, pohon-pohon yang ada yang sudah ada ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Tadi Bu Menteri sempat menyinggung bahwa di dalam IKN ini tidak ada areal orang utan kalau tidak salah. Ini saya bukan ahlinya, tapi mungkin ini terjadi karena sebenarnya aktivitas ekonomi yang sudah memarjinalkan atau menyampingkan habitat orang utan itu sendiri. Jadi mari kita berpandangan bahwa kita harus tumbuh sama-sama dengan segala jenis hewan, tanaman yang ada dan ini kita kembalikan ke aslinya, sedemikian rupa mendekati aslinya. Kita harapkan restorasi, rehabilitasi yang Ibu canangkan benar-benar nanti akan memperkaya, mengembalikan burung-burung yang ada, mamalia, amfibi, dan seterusnya, dan seterusnya.

Terakhir catatan dari saya, kita menghadapi isu-isu global yang sangat krusial seperti perubahan iklim. Kita bicara tadi momentum program mengenai FOLU Net Sink 2030 ini harus terus menjadi salah satu prioritas mengingat volume maupun energi adalah salah satu penyumbang emisi karbon di dunia dan saya sangat berharap rencana untuk menjadikan atau mensukseskan FOLU Net Sink di tahun 2030 ini benar-benar terjadi. Oleh sebab itu, saya dukung penuh program rehabilitasi-rehabilitasi hutan dan lahan yang baik, apakah itu di areal hutan, areal konservasi, tetapi juga lahan-lahan seperti gambut dan mangrove. Banyak sekali catatan-catatan mengenai rehabilitasi mangrove dari daerah dari teman-teman, ini menjadi kesepakatan dan menjadi tujuan kita bersama.

Saya rasa demikian, Pak Ketua, sedikit catatan dari saya dan semoga nanti bagi yang ingin ikut ke Kalimantan Timur untuk meninjau ini ada beberapa perkembangan yang saya rasa teman-teman dari Komisi IV juga harus melihat.

Terima kasih, saya akhiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Budi, atas ajakannya. Ajakan Pak Budi ini sekalian *nemenin* beliau pulang Dapil.

Pak Mindo, silakan.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Makasih, Pak Ketua.

Tadi mengenai hutan sudah, apa sudah. Saya ini spesial di-*addres*-kan kepada Saudara Menteri, Saudara Sekjen, Saudara Dirjen Sampah, yang masih saja berpikir keras, yang tiga ini saja. Pemerintah kabupaten itu setidaknya setiap 3 tahun itu disibukkan untuk mencari tempat-tempat pembuangan air, setiap 3 tahun untuk *landfill*-nya itu. Ini *kan enggak* boleh terus-menerus seperti ini, apa yang bisa dibuat oleh KLHK. Saya sudah tawarkan, ada proses kita buat percontohan teknologi itu tidak akan menghasilkan gas metan. Jadi, Saudara-saudara, pertanian itu juga membuat efek rumah kaca gas metan itu dan tidak sedikit, itu banyak sekali, bisa lebih banyak dari hutan. Satu.

Yang kedua, tidak ada dioksin karena pembakaran plastik. Ada sekarang beberapa daerah dibakar plastiknya. Itu tidak boleh terjadi. *Nah*, saya meminta dibuatkan anggaran untuk satu percontohan yang menyelesaikan itu. Ya *enggak* susahlah itu, Pak Sekjen, anggarannya. Ini secara resmi saya sampaikan di sini supaya memang ini jadi program kita menyelesaikan itu, membantu Pemda. Selanjutnya Pemda itu tidak perlu setiap 3 tahun cari daerah tempat pembuangan air sampah seperti di Dapilnya Ibu Vita tadi ya, baulah, *bikin* pusinglah, begitu. Itu segera selesai. Saya kira kalau ada anggarannya tahun ini, saya garansi percontohan itu selesai dalam tahun ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebelum dijawab...

Terima kasih, Pak Mindo.

Sebelum dijawab, saya persilakan Pak Kepala Badan, ada yang mau dijelaskan? Setelah itu saya kasih waktu Inhutani kalau ada yang mau dijelaskan.

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE:

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Bapak-Ibu Pimpinan Komisi IV yang kami hormati,
Bapak-Ibu Anggota Dewan Komisi IV yang kami hormati,
Ibu Menteri, Pak Wamen, Bapak-Ibu Pejabat Eselon I,

Izinkan kami menambahkan informasi yang telah disampaikan oleh Ibu Menteri terkait kegiatan mangrove. Sebagaimana Bapak-Ibu sekalian ketahui bahwa mulai tahun 2021 BRG diberi tambahan tugas untuk melakukan percepatan rehabilitasi mangrove di 9 provinsi seluas 600.000 hektar. Pada tahun 2021, Bapak-Ibu sekalian, sedianya kami dialokasikan anggaran untuk percepatan rehab mangrove seluas 83.000 hektar, namun demikian karena waktu dan prioritas anggaran yang juga dibutuhkan oleh pemerintah, maka pada tahun 2021 anggaran disesuaikan untuk melakukan percepatan rehab mangrove seluas 33.000 hektar di 32 provinsi. Selain kegiatan fisik pada tahun 2021 kami juga mempersiapkan rencana teknis rehabilitasi mangrove untuk tahun 2022 yang luasnya 50.000 hektar. Namun demikian, Bapak-Ibu sekalian, sampai dengan saat ini anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 50.000 hektar tersebut masih sedang diusahakan di Kementerian Keuangan. Untuk pelaksanaan 2021 sebesar 33.000 targetnya tapi realisasinya sampai 34.500 Bapak-Ibu sekalian, ini sepenuhnya menggunakan pendekatan PEN, karena dana yang digunakan adalah dana PEN. Dana PEN ini di lapangan dilakukan sepenuhnya dengan melibatkan masyarakat. Jadi kami tidak menggunakan pihak ketiga untuk pelaksanaan rehabnya. *Nah*, tahun 2021 dengan luasan yang 34.500 hektar itu bisa disediakan HOK sejumlah hampir 2,9 juta HOK. Lumayan untuk bisa menolong rekan-rekan yang terdampak pandemi.

Nah, untuk tahun 2022, Bapak-Ibu sekalian, dari luasan 50.000 hektar yang sudah tersedia rancangan teknisnya, saat ini di Kementerian Keuangan sedang diusahakan untuk prioritas di 9 provinsi seluas 20.000 hektar, sedangkan sisanya masih terus diusahakan, kemungkinan juga akan menggunakan dana PEN, kemungkinan. Di luar itu, Bapak-Ibu sekalian, kami juga difasilitasi oleh Kementerian Keuangan untuk kemungkinan menggunakan dana bantuan dari *World Bank*. *Nah*, untuk yang dana *World Bank* ini akan diperuntukkan untuk percepatan rehabilitasi mangrove khusus di 4 provinsi seluas 75.000 hektar, sedangkan sisa-sisa kebutuhan anggaran lain, kami berkonsultasi dengan Ibu

Menteri kemungkinan penggunaan sumber pembiayaan yang lain. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Menteri ada menggunakan dana rehab DAS, kemudian juga ada CSR, dan ada kemungkinan juga menggunakan dana yang dikaitkan dengan perdagangan karbon. *Nah*, regulasinya sampai saat ini sedang difinalisasi.

Bapak-Ibu sekalian,

600.000 hektar yang ditugaskan oleh Bapak Presiden, ini sudah kami rancang rencana pelaksanaannya, kita susun *roadmap*-nya dan pendekatan yang kami lakukan untuk pelaksanaan rehabilitasi mangrove ini tidak hanya langsung kepada kegiatan penanaman di lokasi-lokasi yang mengalami degradasi, tetapi juga termasuk penguatan kelembagaan untuk lokasi-lokasi mangrove yang kemungkinan dalam jangka waktu yang akan datang mengalami degradasi. Oleh karena itu, 600.000 yang akan kita laksanakan kita menggunakan pendekatan *landscape* mangrove seperti yang kita lakukan di kawasan gambut. Salah satu yang perlu kita persiapkan untuk percepatan rehab mangrove ini, Bapak-Ibu sekalian, adalah regulasi mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan pengelolaan ekosistem mangrove. Sebagaimana yang kita miliki di gambut kita memerlukan regulasi, entah itu peraturan pemerintah atau Perpres, sehingga mangrove ekosistem mangrove yang ada di luar kawasan hutan bisa kita arahkan, kita konsolidasikan pengelolannya agar sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan dan ini kami mohon terus, Pimpinan, dari Kementerian LHK agar regulasi yang kita perlukan ini bisa kita selesaikan secepatnya.

Saya kira itu, Bapak-Ibu sekalian, yang dapat kami sampaikan untuk kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove dan kaitannya dengan upaya memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Dari dana APBN kira-kira berapa juta pohon mangrove yang akan ditanam 2022?

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE:

Kalau rata-rata...

KETUA RAPAT:

Yang 2021 dulu jawab berapa juta yang sudah berjalan 2021.

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE:

Luasnya 34.500, Bapak, kali 1.300 rata-rata.

KETUA RAPAT:

Berapa jadinya? Anda *enggak* punya catatan?

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE:

Hampir 37 juta, Pak.

KETUA RAPAT:

Berapa?

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE:

37 juta.

KETUA RAPAT:

Jadi, teman-teman, nanti kalau pas provinsinya itu ada mangrovenya, ada mangrovenya, dilihat ya. Yang tahu ada sekian puluh juta cuma Kepala Badan sama Tuhan. Kalau kamu *enggak* percaya data saya, kamu hitung sendiri, itu saja. Zaman Kanjeng juga sama dulu 1 miliar pohon, *wah* sedap. Kalau *lu* *enggak* percaya *lu* hitung sendiri.

Perhutani ada yang mau disampaikan? Silakan.

DIRUT PERUM PERHUTANI:

Saya rasa cukup, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Cukup? Jadi kita Ishoma dulu, balik ke ruang rapat pukul 14.00.

Rapat saya skors.

(RAPAT DISKORS)

KETUA RAPAT:

(SKORS DICABUT)

... seperti yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI, selanjutnya kami persilakan kepada Saudari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan jawabannya.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Terima kasih.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI dan Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI,

Pak Ketua, saya berterima kasih dan menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi atas catatan dan saran maupun pertanyaan yang berlangsung cukup sejuk. Tetapi saya justru menangkap hal-hal yang sangat produktif untuk perbaikan dan untuk hal-hal ke depan di kementerian. Dan saya dari hati yang paling dalam meminta maaf atas keterlambatan berbagai eksekusi lapangan atas harapan-harapan Pimpinan dan yang terhormat anggota maupun terhadap hal-hal yang sesungguhnya telah kami arahkan.

Selain itu, memang selama ini saya masih lebih banyak mengarahkan dengan pijakan normatif. Namun dengan catatan-catatan dari Pimpinan dan para yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota, sebagaimana kompleksitas persoalan dan masalah pekerjaan rumah yang cukup kronis masalah-masalah lingkungan dan kehutanan, cukup banyak dan kompleks, saya sekarang merasakan betul bahwa ini memang beban yang harus secepat-cepatnya diselesaikan dan membutuhkan artikulasi ataupun terobosan-terobosan penyelesaian. Seperti contoh misalnya, Pak Ketua, tadi yang kasus Sukapura, sebetulnya harusnya tidak sulit dan bisa mudah dan lebih cepat, tapi karena norma masuknya ke PP 24 rupanya masuk ke tim, masuk dulu ke SK, masalah dari persoalan yang di masyarakat, itu akhirnya jadi prosesnya panjang. Jadi saya tadi minta ke Pak Wamen, Pak Sekjen, ini akan kita *list* semua catatan dan juga hasil dari kunker selama 2020-2022, maupun pertanyaan pada Raker tanggal 7 Februari dan 17 Februari, termasuk juga misalnya Kinipan. Tadi yang disampaikan oleh yang terhormat Wakil Ketua itu harusnya juga bisa selesai cepat. Tinggal *aja* sebetulnya karena ada kompleksitas dengan kepala daerah. Jadi ini sebetulnya kita bisa carikan artikulasinya, Pak Ketua. Saya tadi sudah bilang Pak Sekjen dan Pak Wamen, kami akan konsolidasi dan intensifkan dalam 2 hari ini dan untuk secepat-cepatnya menyelesaikan yang bisa diselesaikan. Misalnya Situ Gunung, sebetulnya itu juga bisa cepat diartikulasikan, diselesaikan, juga TP Magelang misalnya yang bupati sudah meminta kepada kami, juga termasuk tadi yang diusulkan tentang uji coba lapangan tentang Maggot, apalagi Maggot sudah diekspor. Jadi sebetulnya hal-hal seperti ini saya memahami harapan untuk dilakukan terobosan-terobosan yang cepat. Tentang PT RUM di Sukoharjo misalnya, ini sudah dilakukan penghentian kegiatan, jadi sudah dihentikan kegiatannya, kemudian sudah dilakukan penyidikan. Jadi penegakan hukum pidana, karena ada dugaan pencemaran air dan udara. Yang Danau Matano misalnya, juga yang mulut tambang. Meskipun bagaimana cara menutup, termasuk misalnya harus dengan dinamit begitu, yang ini perlu artikulasi yang lebih kompleks karena kita minta izin pakai gliserinnya *aja* minta izin ke ESDM dan ke Polri misalnya seperti itu. Kemudian soal Desa Teluk Limbong tadi yang disampaikan oleh yang terhormat Ibu Alien ataupun Cikaniki yang di Antam, ini kira-kira areal yang tercemarnya itu 5 kilo sebelah hilir dari Antam. Memang hasil pengambilan sampel KLHK itu menunjukkan nilai sianida di beberapa titik melebihi dari baku mutu air kelas 2. Jadi informasi tambahannya sedang dilakukan. Oleh karena itu, Pak Ketua, saya sekali lagi berterima kasih dan kami akan segera menginventarisir, maaf, tanda kutip, Ketua, 'beban' pekerjaan rumah yang kami akan harus selesaikan di lapangan. Itu yang pertama.

Yang kedua tentang IKN. Tadi seperti telah kami sampaikan dan kami berterima kasih atas berbagai catatan, termasuk juga bagaimana tentang *safeguard*, kemudian tadi dari yang terhormat Ibu Wakil Ketua juga tentang hal-hal, *measurement* bagaimana cara mengukurnya, indikatornya, dan sebagainya. Kami mendukung untuk secepat-cepatnya bisa dilakukan FGD, sekaligus Pak Sekjen mungkin dengan FGD yang soal PNBPN.

Kemudian terkait dengan pendataan aktivitas ilegal, baik tambang maupun kebun, tadi mungkin Pak Ansi yang terhormat datangnya agak terlambat, tadi sudah diarahkan oleh Pak Ketua bahwa akan dilakukan mobilisasi tim kerja lapangannya KLHK, kita akan ambil contoh di Kalimantan Tengah dan di Riau. Tadi diproyeksikan Kalimantan Tengah sekian ratus ribu hektar, di Riau satu koma sekian juta hektar. Tadi Pak Ketua kasih waktu 4 bulan untuk dua lokasi. Kami termasuk yang akan kami konsolidasikan besok ya, Pak Wamen.

Kemudian ini juga ada persoalan artikulasi juga yang akan kami lihat, akan kami dalam. Tadi saran dari yang terhormat Anggota berkaitan dengan persoalan pemberdayaan masyarakat, KBR, dan lain lain, termasuk Bang Pesona. Ini nanti kita lihat dari sisi penyesuaian terhadap kebijakan. Karena misalnya begini, sekarang Bapak Presiden sudah memerintahkan bahwa langkah untuk pemulihan lingkungan didahului dengan jaminan kesiapan bibit. Dengan demikian sebetulnya hub-hub di tingkat bawah berlapis sampai ke desa *kan* musti di-*setting*, termasuk bagaimana mengontrol yang sudah ditanam, itu juga tadi menjadi catatan dari yang terhormat para anggota. Jadi ini akan kami coba artikulasikan dan coba sesuaikan.

Kemudian tentang sampah dan limbah, pada dasarnya sesuai dengan Undang-Undang 18 memang bobot tanggung jawabnya ada di pemerintah kabupaten dan kota. Tetapi memang bimbingan dan sebagainya, fasilitasi itu dari kementerian sebagai *stakeholders* tertinggi, baik PU maupun KLHK, ini diperlukan. Saya mencatat hal-hal yang menjadi saran.

Tentang danau, di dalam Perpres 61 itu sudah ada rencana aksinya. Saya nanti akan cek, saya akan minta Dirjen, pada bagiannya KLHK itu kira-kira rencana aksi apa yang kita bisa tempuh, termasuk tadi untuk Danau Matano dan sebagainya.

Kemudian terima kasih tentang Karhutla menjadi perhatian. Memang kalau di waktu yang lalu kita selalu lihat Riau, Jambi, Sumsel, Kalteng, Kalbar, Kalsel, itu yang selalu bermasalah. Pada belakangan 2 tahun terakhir ini, 2-3 tahun terakhir sejak 2019, 2020, 2021, kita kelihatannya lebih deg-degan terutama di Riau dan Kalbar. Oleh karena itu, hampir setiap bulan kami melakukan rapat bersama, yang penting sebenarnya BMKG, dan TNI, dan BRIN, untuk membahas dan menyiapkan mana yang harus disiapkan lebih dahulu untuk mencegah, dan BRGM tentu, karena di situ ada tingkat kekeringan gambut. Kita memang merencanakan pada akhir bulan ini sudah bisa dilakukan teknik modifikasi cuaca, hujan buatan di daerah-daerah gambut, terutama di Kalimantan Barat dan di Riau.

Selanjutnya, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi tentang dukungan mengenai Polhutsa. Kami juga melihat hal yang cukup mendesak mengenai Polhut ya, Pak Hanan. Sekarang jumlahnya *enggak* sampai 7.000, dan kalau dilihat mungkin persentasenya cukup besar yang sudah usianya akan berakhir dari tugas. Kami sebetulnya sudah meminta kepada Kementerian PAN dan RB untuk bisa terus ditambah. Tetapi kalau kita minta 1.000 dapatnya mungkin hanya 100 begitu. Ini kami akan cek, kami akan teliti kembali dan melihat lagi apa yang kita bisa terobos. Karena PP tentang Polhut sebagai jabatan fungsional itu sedang dalam proses. Jadi sedang dalam proses permintaan paraf para menteri ya, Pak Sekjen. Jadi, terima kasih. Namun demikian, Gakkum saya lihat Pak Dirjen sudah terus mengangkat bagaimana ada semangat begitu untuk menyiapkan Polhut lebih profesional, bagaimana *support*-nya, bagaimana pendidikan dan latihannya juga seperti itu. Hal yang analog dengan Polhut adalah Manggala Agni. Kami juga sedang berusaha bahwa Manggala Agni ini juga bisa jadi fungsional juga, misalnya seperti itu.

Saya juga berterima kasih perhatian terhadap KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yang otoritasnya ada di bawah UPT daerah di tingkat provinsi. Selama ini memang wilayahnya KLHK yang menetapkan, kemudian organisasi dan personilnya Pak Gubernur, tetapi *scope of work*-nya masih dari KLHK, kita masih berikan bimbingan-bimbingan dan memang dengan regulasi yang baru, undang-undang baru, PP baru, KPH-nya perlu terus-menerus dibina, Pak Hanan yang terhormat, untuk peningkatan peran barunya sebagai fasilitator begitu. Kemudian saya perhatikan tentang perizinan tumpang tindih dan rekomendasi gubernur. Berarti ini sesuatu lagi yang baru, Pak Sekjen. Nanti kami akan bahas kembali juga soal ini, dan juga tentang hal-hal berkaitan dengan rehab DAS dan sebagainya.

Lain-lain kami akan sampaikan secara tertulis, Pak Ketua.

Sekali lagi terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Dedi mau *ngomong*? Silakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Baik, saya ke Pak Wamen, *kan* lebih memahami perjalanan kita yang di Kalimantan Tengah.

Kalau ada *problem* di tingkat daerah sampaikan *problem*-nya apa, *gitu kan*. Kalau ada *problem* di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampaikan *problem*-nya apa. Karena saya ini menginginkan setiap kunjungan saya itu melahirkan sesuatu, kemudian terbuka. Karena kalau tidak melahirkan sesuatu terbuka, apalagi berangkatnya cuma berdua, Pak, bertiga sama Bapak, itu melahirkan interpretasi. Saya dengan Pak Darori pergi ke Kalteng ketemu dengan orang yang punya kuasa wilayah perkebunan, kemudian sampai sekarang masalahnya *enggak* kelar-kelar. *Nah*, ada apa *nih*, pasti begitu, Pak Darori sampai pegang-pegang rambut, *ngitung* jumlah rambutnya berapa. *Nah*, ini menurut saya

tegasin saja oleh Bapak dan saya minta ke Pak Ketua *dimasukin aja* di kesimpulan agar menjadi perhatian bagi kita semua.

Terus yang kedua, saya ingin penegasan Ibu lagi, sekali lagi, mohon setelah nanti RDP, Kementerian Lingkungan Hidup mengumumkan *deh* berapa kerugian dari kawasan sawit ilegal. Negara dirugikan, tidak bayar PBB, tidak bayar pajak penjualan. Terus yang paling menarik adalah hasil sawit ilegal ini *kan* berarti diekspor, Bu. *Nah*, ini kalau diekspor berarti *kan* ada yang belinya. Kalau ada yang belinya berarti *kan* ada pabriknya. *Nah*, pertanyaannya ini ada pabrik mengelola sawit ilegal. *Kok* Pabriknya bisa berdiri? Izin pabriknya dari mana? *Gitu loh*, izin pabriknya dari mana? Ini juga aneh lagi *kan*. *Kan* tidak mungkin hasil produksi sawit yang ratusan ribu hektar itu tidak dijual dan tidak dikelola oleh pabriknya, pasti ada pabriknya. *Kan* itu tinggal diurai saja. Menurut saya sawit ilegal ini persoalan mudah, mudah *banget*, saya pikir orang biasapun bisa mengungkapkannya. Tapi kayaknya sulit mengungkapkannya ini kayaknya ini yang paling penting, persoalan mudah yang gampang mengungkap tapi sulit mengungkapkannya. Untuk itu jangan ragu untuk mengungkapkan *deh* untuk kebaikan bangsa ini agar rakyat kita bisa dapat minyak yang murah dari tanah airnya sendiri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya bingung, Pak Dedi, yang mau *dimasukin* apanya ini tadi? Dalam kesimpulan rapat apa yang *dimasukin*?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Dimasukkan bagaimana tindak lanjut dari izin yang diberikan terhadap hutan yang oleh masyarakat adat diklaim sebagai hutan adat yang bermanfaat bagi kehidupan mereka tetapi kemudian dikeluarkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup hampir 11.000 hektar lebih dari 19 yang dimohon, *kan gitu loh*. Kemudian status tanahnya itu *kan* asalnya hutan produksi. Kalau hutan produksi mekanismenya bagaimana? Areal penggantinya di mana?

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Dijawab dulu *deh* pertanyaan Pak Dedi sebelum diambil kesimpulan. Siapa yang mau menjawab? Pak Wamen?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Pak Wamen *deh* yang datang ke situ.

WAKIL MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Izin, Bu Menteri.

Yang saya hormati Pak Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh Anggota Komisi IV yang mulia,

Izin, Bu Menteri, saya izin menjawab.

Jadi sebetulnya menindaklanjuti kunjungan kerja kita dulu, Pak Wakil Ketua, Pak Darori dan Pak Bambang ya, jadi sebetulnya tahun lalu sudah kita ambil langkah. Karena permohonan mereka *kan* minta hutan adat. Terus waktu itu salah satu kendala hutan adat itu adalah proses regulasi di mana harus kuat Perda dan sebagainya, sehingga saya merapatkan tahun lalu yang melibatkan bupati dan jajarannya secara virtual ya, kemudian saya dan Dirjen PSKL dan direktornya, kemudian provinsi, termasuk PT SML-nya, Pak. Jadi saya dulu menawarkan transisi sebetulnya untuk diberikan dulu hutan desa yang dikelola, misal kata kalau itu prosesnya dulu sangat cepat, Pak, sebulan bisa keluar. Waktu itu kesepakatan rapat setuju semua, termasuk Effendi Buhing dan teman-temannya menyepakati itu. Entah setelah itu, sehari setelah itu tiba-tiba Pak Effendi Buhing dan teman-temannya WA menolak opsi itu hingga tetap ingin hutan adat. *Nah*, kita tetap jalankan, saya minta Pak Dirjen dan jajarannya waktu itu *ngurus* proses hutan adat itu kendatipun memang tadi, dibutuhkan tetap Perda tapi ada dengan Permen yang baru ada bisa kemudahan ya, kita tetapkan Wilha-nya, Pak, oleh Ibu Menteri dalam hal ini, dan ini yang sedang kita proses. Dan ada lagi alasan Pak Bupati terus terang barusan ini, batas Desa Kinipan itu belum jelas, masih konflik antar desa. Saya bilang dengan Pak Dirjen, "*Udahlah*, kita, *kan* tidak mesti luas hutan adatnya itu sama dengan seluruh luas desa *kan*. Kita deliniasi *aja* berapa hektar *gitu* untuk pemberian hutan desa. Nanti disesuaikan setelah batas desanya selesai." Dan itu saya kira langkah yang bisa dipercepat, Pak, dan tadi Ibu Menteri juga sudah mengarahkan kami dalam waktu 1-2 bulan kita upayakan harus selesai, dan perusahaan juga, Pak, pemilik (*owner*) perusahaan juga setuju, Pak, tidak akan membuka dulu wilayah yang dulu diklaim itu, tidak akan membuka dan seterusnya, dan bersedia menyerahkan sepenuhnya ke masyarakat adat.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Baik, berarti *kan* tidak dilanjutkan penebangan, *cleaning* terhadap areal yang sisa tinggal 7.000 hektar lagi, 8.000 hektar lagi *kan*. *Nah*, kemudian dari yang 11 sudah diberikan izin itu tanah penggantinya di mana?

WAKIL MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Nah, kalau ini mungkin Pak Dirjen PKTL ini yang jawab ini. Silakan.

DIRJEN PKTL:

Kami nanti cek dulu, Pak Wamen, ininya, lokasinya. Desanya *kan* batas desanya juga belum ini, Pak Wamen.

KETUA RAPAT:

Jadi *gini ajalah* singkatnya, itu masih illegal, *gitu aja*. Capek saya *muter-muter* dari tadi. Kalau ditanya belum siap data, belum siap data, belum siap data. Mau jadi apa ini Raker. Saya rasa dari tadi sudah menurunkan tensi saya. Jangan kalau ditanya selalu datanya belum lengkap, datanya *enggak* ada, datanya belum cukup, mau *nanya nyari* data lagi, sudah pelepasan. Ampun Tuhan.

Ya, silakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Kan mekanismenya tidak dulu dilepas kalau sebelum ada tanah pengganti. *Kan* tanah penggantinya ada, setelah itu dikeluarkan izin pelepasan. *Nah*, pertanyaan sekarang *kok* sudah dilepaskan tapi tanah penggantinya sampai sekarang *enggak* tahu di mana. Berarti *kan* negara *ilang* lagi *nih* 11.000 hektar. Kalau dihitung jumlah tegakan pohonnya, satu pohonnya berapa rupiah kali 11.000, dinikmati lagi hanya oleh orang per orang atau korporasi. Tapi kalau rakyat *nebang* satu pohon *aja* pidananya luar biasa, *gitu loh*. Pak Darori, silakan *ngomong deh*, jangan saya terus.

KETUA RAPAT:

Ngomong aja enggak apa-apa, Kanjeng, Kanjeng *udah* bukan pejabat di sana, Kanjeng pejabat di sini.

F-P. GERINDRA (Ir. K.R.T. H. DARORI WANODIPURO, M.M.):

Ya, *makasih*.

Jadi beginilah ya, teman-teman KLHK, pertama kita *udah* bukan barang baru ya KLHK ini. Jadi setiap pelepasan sebelum dilepas mesti ada area pengganti karena itu hutan produksi. Mestinya sudah ada data. Ya, biasanya itu di dalam satu wilayah provinsi atau provinsi lain. Dan saya sarankan pada Bu Menteri untuk areal pengganti itu berdasarkan NJOP, Bu. Ini kejadian Pantai Indah Kapuk, 1 hektar diganti 2 hektar di Sukabumi. Di Sukabumi 2 hektar hanya 20 juta, di situ 1 meter *udah* 20 juta. Ini kebetulan KPK datang ke saya konfirmasi, "Dulu ceritanya *gimana?*" "*Waduh*, Pak, waktu keluarnya Pantai Indah Kapuk semua menterinya sudah meninggal", saya bilang *gitu*, "...jadi *enggak* lanjut, Pak. Kalau itu lanjut." Coba, mestinya NJOP di Pantai Indah Kapuk itu berapa itu dibelikan tanah di tempat lain, dinilai negara *enggak* rugi. Bukan 1 banding 2, 1 banding 3, saya kira *enggak* perlu lagi. Kalau itu memang PP atau SK Bu Menteri tolong ini diperbaiki ke depan NJOP-nya berapa, Pantai Indah Kapuk *kan* 1 meter *udah* 30 juta, Pak. *Nah*, kita tukarnya 2 hektar, 1 hektar di Pantai Indah Kapuk *udah* 20 miliar, 200 miliar, ditukar hanya 20 miliar di Sukabumi kampungnya Pak Slamet. *Nah*, KPK datang, ini jujur *aja*, konsultasi, karena katanya pejabat lama. Setelah saya teliti, Pak, ini orang yang tanda tangan sudah meninggal semua, saya kira *enggak* perlu lanjutlah *gitu*. Ternyata *enggak* lanjut, Pak. Kebetulan menterinya sudah meninggal. Kalau belum *wah* diobok-obok lagi itu.

Terima kasih, Pak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Ketua, Bu Menteri yang saya hormati,

Saya ingin..., ini *kan* satu kasus, Bu, dan menurut saya masih kecil, hanya 11.000 hektar. Mungkin banyak ribuan dan ratusan ribu hektar pelepasan hak hutan, hak atas tanah, areal hutan, yang berubah jadi sawit, jadi tambang, bisa jadi tanah penggantinya belum ada sampai hari ini. *Nah*, ini *kan* harus diidentifikasi. Saya katakan sekali lagi, negara ini rugi berapa ribu triliun lagi. *Nah*, ini *kan* kalau tidak segera kita *stop*, seluruh perkara-perkara ini menumpuk, nanti akan menjadi bumerang bagi waktu yang akan datang. Saya tidak ada maksud apapun kecuali mari kita bersama-sama menyelamatkan negeri ini. Jangan sampai hutan hilang, negara tidak kebagian apa-apa, rakyat tidak kebagian apa-apa, dinikmati beberapa orang, itu saja *kok* pesan saya. Tadi Pak Budi mengatakan jumlah hutan semakin mengecil. Ketika jumlah hutan semakin mengecil, kompensasi kita tidak dapat apa-apa. PNPB *enggak* dapat, bayar pajak tidak, penggantian tanah juga tidak ada, rakyat juga tetap tidak menikmati apapun kecuali bencana. Barangkali ini harus segera dibenahi, Pak.

Terima kasih.

INTERUPSI F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pak Ketua, sedikit interupsi.
Terima kasih, Pak Ketua.

Ini *kan* permasalahan serius, Pak, dan kalau tidak salah kita ada Panja Pelepasan Kawasan Hutan, sehingga nampaknya pembahasannya detailnya di sana. Walaupun nanti kesimpulannya seperti apa akan lebih komprehensif di sana. Mungkin seperti itu usulan saya, Pak. Artinya kerja Panja mungkin bisa secepat mungkin untuk kemudian menemukan kesimpulan.

Terima kasih, Bapak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas masukannya, Pak Slamet.

11.000 hektar itu 1 kasus. Mungkin masih ada ribuan kasus. Sementara rakyat saya di Lampung dari tahun 52 itu Pekon atau Desa Sukapura 309 hektar untuk tempat tinggalnya *aja* masih ribut, *dilepasin aja* susah. Mereka bukan mencuri, mereka transmigrasi dari Jawa Barat.

Satu lagi yang saya *nuntut nih*, saya belum marah lagi *nih*, Bupati Lampung Barat ketemu Sekjen minta pinjam pakai untuk melewati kawasan hutan lindung tiang listrik. *Alhamdulillah* sampai hari ini *enggak* ada jawabannya. Bagaimana saya *enggak* malu sebagai wakil rakyat. Kalau saya tidak bisa begitu berarti saya ini melanggar sumpah saya, sumpah janji saya sebagai Anggota DPR. Saya juga

minta penjelasan nanti masalah Sukapura ya, kalau perlu masukkan dalam kesimpulan ya.

Ada yang mau bertanya lagi? Pak Hanan?

F-PG (Ir. H. HANAN A. ROZAK, M.S.):

Tadi saya mengharapkan Inhutani bicara, tadi *enggak* ada informasi dari Inhutani ya. *Nah*, ini saya minta ini, Pak Ketua, kaitan dengan izin-izin yang dikelola Inhutani, ini banyak yang tidak mampu dikerjakan. 44 misalnya, register 44, register 45, itu kerja sama dengan swasta, kemudian register-register yang lain, mungkin di tempat lain juga seperti itu. *Nah*, ini perlu dievaluasi ini, Bu Menteri, internal kita *gitu loh*. BUMN internal kita ini perlu dievaluasi juga. Ada pembiaran di situ, bahkan di 44, register 44, Inhutani V itu ada yang memberikan izin, oknum dari Inhutani memberikan izin untuk tanam tanaman yang bukan tanaman kehutanan, Pak, izin tebu saya dengar sekarang ini, dan tidak sedikit di register 44. *Nah*, ini saya kira saya titip selain mengevaluasi yang bukan lingkungan kita, yang di lingkungan kita dulu dievaluasi juga yang dikuasai oleh Inhutani mampunya semana. Kalau misalnya tidak mampu, hanya mampu separuh ya separuh *aja*, separuhnya diapakan, diambil kebijakan *gitu*.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Satu hal buat *ngingetin aja*, Pak. Kalau saya *sih* komitmen terhadap hutan kuat, Pak, *enggak* main-main. Saya dulu minta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak *ngeluarin* izin penggunaan kawasan hutan sebagai jalan lintasan tambang di Purwakarta, tapi tetap diberikan. Karena saya sudah memprediksi kalau sudah diberikan pasti makin banyak bangunan orang luar, pakai tempat kejahatan, Pak. Bapak bisa lihat tayangan kemarin saya, kemarin saya *bongkarin* seluruh bangunan itu karena aparat Perhutani *enggak* ada yang berani. Saya *bongkarin* dan saya *biayain*, Pak. Artinya kalau saya sudah meminta sesuatu itu minta sesuatunya perlindungan. Kalau orang lain minta ke Perhutani minta kawasan tambang. Saya menolak kawasan tambang tapi tetap diberikan. Setelah itu sekarang *udah numpuk*, *udah mulai enggak karu-karuan gitu loh*, tanaman jatinya *udah* mulai rusak. *Nah*, ini komitmen. Untuk itu saya minta cabut *deh, gitu loh*, Pak, cabut, karena pasti kalau sudah diberikan penyimpangan terjadi. Itu saja.

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Dedi.

Pak Hanan hanya membantu menjelaskan 44, 45, sedang sengketa, masih di pengadilan antara pengusaha dengan Inhutani, itu *aja*. Karena beberapa waktu lalu saya pernah ketemu sama Inhutani di Lampung, saya tanyakan, masih di

pengadilan sengketa. Itu juga tanah yang cukup terlantar, 44, 45 itu. Yah, saya hanya bantu jelaskan, jadi mereka sedang bertarung. Bukan begitu, Pak Dirut? Tolong jelaskan.

DIRUT PERUM PERHUTANI:

Betul, Pak Ketua.

Jadi mohon izin, Bu Menteri, menyampaikan bahwa anak perusahaan kami yaitu Inhutani V, ini hadir juga Pak Dirutnya, memang direksi 44 dan 45 itu sengketa, Pak. Jadi waktu itu di tahun 2014 itu dikerjasamakan jangka yang sangat panjang dan karena wanprestasi, tidak membayar PBB, kami....

KETUA RAPAT:

Rasanya bukan 2014 loh itu, 2009 loh, saya baru masuk jadi Anggota itu, saya masih ingat, Iya kan 2009 kan?

DIRUT PERUM PERHUTANI:

Betul, Pak.

KETUA RAPAT:

Kan 2009 kan? berapa tahun kerja samanya?

DIRUT PERUM PERHUTANI:

Sampai 30 tahun.

KETUA RAPAT:

30 tahun?

DIRUT PERUM PERHUTANI:

30 tahun, Pak.

KETUA RAPAT:

Tapi sekarang masih sengketa?

DIRUT PERUM PERHUTANI:

Iya, jadi kami sedang menggugat, Pak. Secara perdata kami gugat di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, secara pidana kami gugat di Kejaksaan Agung, Pak.

KETUA RAPAT:

Harusnya jangan 30 tahun, 1.000 tahun sekalian kasihnya. Ya jangan tanggung-tanggung, jadi *enggak* usah perpanjang-perpanjang lagi ya, itu *aja*.

Terima kasih, Bu Menteri, sudah menyampaikan jawabannya.

Yang masalah tadi 3 atau 9 Sukapura sama PLN *enggak* perlu dijawablah, terserah *aja*, itu saja, saya sudah capek, saya malu juga saya. Harga diri saya *kan diinjek-injek* ini.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Dari dialog, saran dan masukan Anggota Komisi IV, sebelum acara ini kami akhiri kami akan bacakan rancangan kesimpulan rapat kerja pada hari ini. Sebelum kami menyampaikan rancangan, membacakan rancangan kesimpulan, kita lihat video ini sebentar. Kiki, tampilkan. Ini adalah kelahiran badak Sumatera di Taman Nasional Way Kambas. Ini yang sangat luar biasa sekali, belum tentu 10 tahun mendapat kelahiran bayi badak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Oh badak jarang lahiran ya?

KETUA RAPAT:

Jarang, beda sama Pak Dedi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Saya enggak pernah lahiran. Saya bikin orang lahiran bisa.

KETUA RAPAT:

*Kan ngaku kan ya. Nanti dikasih nama aja yang baik supaya dijaga dengan baik, dirawat dengan baik, dan kalau perlu dialokasikan khusus untuk anggaran perawatannya. Karena dunia *kan* sangat menyorot sekali, apalagi banyak gajah mati, apa mati, itu *kan* jadi sorotan dunia, harimau mati, *gitu*. Dirjen KSDAE, saya mau tanya, harimau yang cacat belum dilepaskan *kan*?*

DIRJEN KSDAE:

Belum, Pak, ... *(tidak menggunakan mic)*.

KETUA RAPAT:

Ya, kalau kandangnya belum selesai jangan, saya *enggak* mau. Jangan sampai dia lepas di hutan, malah diburu orang lagi. Saya *enggak* mau terjadi dua kali seperti itu.

Sudah siap belum? Silakan, Pak Budi, bacakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih, Pak Ketua.

Izinkan membacakan kesimpulan keputusan rapat kerja hari ini.

Kesimpulan keputusan:

1. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan laporan komprehensif perihal penyelesaian pemukiman dalam kawasan hutan lindung di Desa Sukapura Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. Selanjutnya laporan dimaksud agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya 1 bulan sejak dilaksanakannya rapat kerja hari ini.

Komisi IV? Pak Ketua? Bu Menteri?

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera menyelesaikan permasalahan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, baik yang disampaikan dalam kesempatan kunjungan kerja Komisi IV DPR RI maupun kesempatan lainnya. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan laporan secara tertulis dan periodik atas seluruh tindak lanjut permasalahan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat yang dimaksud.

Komisi IV? Bu Menteri?

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan inventarisasi dalam rangka menyelesaikan data kebun dalam kawasan hutan yang dilengkapi dengan poligon, nama pemilik, lokasi yaitu desa, kecamatan dan kabupaten/kota, serta luas masing-masing kebun. Laporan dimaksud agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI dengan tata waktu sebagai berikut. Maaf, data kebun dan tambang dalam kawasan hutan yang dilengkapi dengan poligon, nama pemilik, lokasi yaitu desa, kecamatan dan kabupaten/kota, serta luas masing-masing kebun dan tambang. Laporan yang dimaksud agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI dengan tata waktu sebagai berikut.
 - a. Provinsi Kalimantan Tengah: 31 Mei 2022, dan
 - b. Provinsi Riau: 31 Juli 2022

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Bentar, Alien.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Dengan tata waktu selambat-lambatnya sebagai berikut:

- a. Provinsi Kalimantan Tengah: 31 Mei 2022, dan
- b. Provinsi Riau: 31 Juli 2022

Komisi IV? Bu Alien ada masukan?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Karena ini di dua provinsi saja, tapi untuk saya *sih* data kebun dan tambang atau peruntukan lainnya *gitu, ditambahin aja*. Kan pelepasan kawasan hutan itu bukan hanya untuk kebun dan tambang, tapi ada peruntukan lainnya.

INTERUPSI F-GERINDRA (Ir. K.R.T. H. DARORI WANODIPURO, M.M.):

Ketua, mungkin kurang lengkap itu ya, hutan untuk melakukan inventarisasi dalam rangka menyelesaikan data kebun dan tambang ilegal. Kalau tambangnya sudah jalan, saya kira *enggak* ada masalah itu. Mungkin tambang ilegal saja untuk mempersempit permasalahan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Baik, dikoreksi. Coba dimasukkan “serta peruntukan lainnya”. Jadi data kebun, tambang, serta peruntukan lain yang ilegal. Diganti “peruntukan” menjadi “penggunaan”. Saya ulangi.

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan inventarisasi dalam rangka menyelesaikan data kebun, tambang, serta penggunaan lainnya yang ilegal dalam kawasan hutan yang dilengkapi dengan poligon, nama pemilik, lokasi (desa, kecamatan, dan kabupaten/kota) serta luas masing-masing kebun dan tambang, serta penggunaan lainnya yang ilegal. Laporan yang dimaksud agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI dengan tata waktu selambat-lambatnya sebagai berikut:
 - a. Provinsi Kalimantan Tengah 31 Mei 2022
 - b. Provinsi Riau 31 Juli 2022

Komisi IV?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Setuju

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Bu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Luas itu, jadi jangan masuk ke kata-kata serta luas masing-masing kebun, *bla bla*, dan sebagainya. Karena ketika kita mengidentifikasi, itu *udah* langsung poligon, luas, dan kalau nama pemilik itu mengandung konsekuensi hukum sebetulnya, mengatakan pemilik. Kalau boleh saya minta diganti dengan nama perusahaan/pengelola, itu pasti akan kedeteksi. Tapi kalau bilang pemilik perusahaan belum semua *kan*, Pak Dedi. Kalau beberapa *kan* sudah lengkap, tapi *kan* belum semua. *Kan* diminta oleh Komisi IV semuanya, seperti sensus. Tapi kalau nama pemilik itu ada persoalan hukum di situ. *Enggak* apa-apa, memang harus kita cari itu nama perusahaannya.

KETUA RAPAT:

Ini sudah saya suruh ganti nama perusahaan dan pengelola. Ya, udah betul-betul.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Iya. Kemudian luasnya, jadi dengan poligon koma luas....

KETUA RAPAT:

Luas atau luasan?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Luasan, jadi poligon, luasan *gitu*, terus nama perusahaan. Luasan koma nama perusahaan, lokasi, desa, kecamatan, kebun, titik. Jadi serta luasnya sampai titik itu dihapus. Iya sampai situ, sampai ilegal.

KETUA RAPAT:

Ya, Kanjeng.

F-P. GERINDRA (Ir. K.R.T. H. DARORI WANODIPURO, M.M.):

Jadi begini, Bu Menteri, kenapa muncul pemilik, di Riau itu banyak pabrik kelapa sawit PKS tidak punya kebun sawit, itu adalah sawit-sawit rakyat yang luasnya lebih dari 100 hektar tapi pemiliknya satu orang, Bu. Apa itu *kan* bukan perusahaan *gitu*? Saya kira pemilik/pengusaha, Bu. Karena di Riau itu nanti

kesulitan, dia bukan pengusaha tapi pemilik. Kita *udah* punya datanya itu yang ratusan hektar per orang itu, Bu. Jadi kalimatnya apa itu? Saya kira pemilik, Pak, karena satu orang yang punya, bukan perusahaan.

Terima kasih.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Kalau itu sebagai opsi, Bapak, kalau itu sebagai opsi saya kira *enggak* apa-apa perusahaan, pengelola/pemilik. Jadi bisa salah satu kita dapat. Tapi kalau pemilik *aja kan* jadi berbeda. Jadi perusahaan, pengelola/pemilik. Karena *kan* yang di Tesso Nilo *kan* banyak *banget* pabriknya, *enggak* tahu dari mana itunya. *Nah*, dia berarti dari hutan konservasi. Tapi *kan* izin pabriknya dari kabupaten, bukan dari kita *gitu*.

Makasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi *gini*, ini *kan* sebetulnya ada kesalahan pemerintah dalam hal ini c.q. Dirjen Perkebunan, juga Kementerian Perindustrian. Setahu saya setiap membangun PKS wajib memiliki sekian puluh persen kebun milik sendiri dan 20% plasma. Tapi *kan* nyatanya *enggak* ada yang *ngawasin*, *iya kan*, ya suka suka *gualah*, *gua* mau bangun ya bangun. Akibatnya apa? Banyak terjadi pencurian terutama PTPN punya. Pengawasan kurang ya dicuri, dijual ke pabrik yang tadi *tuh*. Kita lihat saja, Pak, *iya kan*, hampir semua PTPN punya kebun sawit dicuri. Swasta *aja* dicuri yang ada pengawasan, apalagi PTPN yang kurang pengawasan.

Jadi pemerintah sudah setuju nomor 3?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Setuju, Ketua.

KETUA RAPAT:

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

4. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait rencana program prioritas tahun 2023. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menyusun rencana program dan anggaran tahun 2023 yang memberikan manfaat lebih besar untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian hutan,

meningkatkan kualitas sumber daya aparatur kementerian, serta pemenuhan komitmen global untuk mencegah perubahan iklim.

Komisi IV? Bu Menteri?

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

Jangan dites *nih*, Pak Dedi, ini bisa sewaktu-waktu lebih kencang lagi.

5. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan pendalaman dan diskusi pembahasan dan kesimpulan rapat kerja hari ini.

Komisi IV? Bu Menteri?

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

6. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka melakukan pendalaman atas program pembangunan ibukota negara (IKN) nusantara.

Komisi IV? Bu Menteri?

KETUA RAPAT:

Tadi bukan waktu itu saya dengar katanya masalah itu juga, PNBPN ya kalau *enggak* salah.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Coba ditambah.

INTERUPSI F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan, izin.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Silakan, Bu.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Untuk soal PNBPN itu *kan* dalam Raker kemarin kita juga sempat singgung *kan*, Bu, dan masuk dalam satu kesimpulan Komisi IV, tinggal ditambah *aja* untuk memperkuat. Selama ini juga kita melihat bahwa PNBPN yang didapatkan oleh

KLHK itu 6 triliun lebih ya, *eh* 5 triliun, itu peruntukannya untuk KLHK *enggak* sampai berapa persen ya, Bu, ya? *Nah*, ini yang menjadi tanda tanya besar juga. Kalau bisa kita Komisi IV minta dorongan kepada pemerintah c.q. Keuangan juga untuk KLHK menyampaikan bahwa betapa pentingnya pembagian distribusi PNBPN negara ini untuk KLHK untuk peruntukannya.

Makasih, Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Baik, kita tambahkan ini setelah ibukota negara dan pembahasan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kompensasi.

Komisi IV, Bu Menteri, setuju?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Setuju, Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

7. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data kewajiban kegiatan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dahulu IPPKH dan pemegang keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan Akibat Tukar Menukar Kawasan Hutan per 31 Maret 2022. Selanjutnya, data dimaksud agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya dua minggu sejak dilaksanakannya rapat kerja ini.
Komisi IV? Bu Menteri?

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan penjelasan kepada Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai penyelesaian penggunaan dan pelepasan kawasan hutan mengenai...

Ini gimana sih nih.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Tentang tindak lanjut.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Saya ulangi.

Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan penjelasan kepada Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai penyelesaian penggunaan dan pelepasan kawasan hutan tentang tindak lanjut pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang terindikasi merupakan wilayah hutan adat di Kabupaten Lamandau dan wilayah lainnya termasuk di dalamnya penjelasan mengenai kewajiban lahan pengganti yang merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dalam proses pelepasan kawasan hutan.

Pak Dedi, ini ditambahkan "Provinsi Kalimantan Tengah". Setuju, Komisi IV? Bu Menteri? Pemerintah?

Silakan, Bu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Boleh *enggak* dispesifikkan hutan adat Desa Kinipan?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Tolong di desanya ditambahkan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Terima kasih, Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Sudah, Komisi IV? Bu Menteri?

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

INTERUPSI F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan, izin.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Bu Menteri, tadi termasuk salah satu rekomendasi di Komisi IV di poin 7, memang kami belum ada data yang spesifik tentang DAS itu. Tolong kami diberikan, karena memang ini sangat penting, Bu, sangat penting.

Kemudian saya terima kasih sekali, karena kemarin Ibu Menteri sudah menyampaikan penyampaian tentang edu ekowisata yang ada di Provinsi Maluku Utara. Kami mengkampanyekan untuk Kepulauan Sula itu akan bebas dari sampah plastik. Tolong perhatiannya juga, Bu Vivin, karena daerah kami itu termasuk daerah yang bagus tapi untuk sampahnya ini menjadi PR buat kita semua. Untuk di Kabupaten Kepulauan Sula itu sudah mengkampanyekan anti plastik dan semuanya sudah masuk penggunaan dari tempurung untuk minum dan sebagainya. Tolong dibantu agar menjadi kesuksesan untuk bebas sampah.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Mbak Alien.

Bu Vivin, saya akan sidak di wilayah Jakarta, nanti saya minta Sekretariat mengirim surat pencemaran lingkungan yang sangat luar biasa sekali dan saya anggap pengelola wilayah tersebut sangat bodoh. Nanti saya kasih tahu tempatnya di mana. Saya juga sudah bicara dengan Sekjen KKP, sama menteri juga saya sudah bicara, termasuk dengan PSDKP ya, ini sangat merusak lingkungan sekali.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Sebelum kami menutup rapat kerja ini, kami persilakan Saudari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan kata penutup.

Silakan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Terima kasih.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI dan Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI,

Sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas catatan dan dukungan serta dorongan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang cukup banyak dan tidak mudah. Tapi dengan dukungan yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, saya kira akan bisa diselesaikan. Terima kasih, Pak Ketua, Bapak-Ibu Wakil Ketua, dan Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang pas.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om santi santi santi om,*

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Kami tidak bermaksud jahat atau bermaksud apa. Kami ingin menegakkan aturan, ingin membela bangsa dan negara.

Dengan demikian kami sudah rapat kerja pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan, kekhilafan.

Dengan mengucapkan *alhamdulillah robbil'alamin*, rapat kerja ini kami tutup.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.10 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

Drs. ACHMAD AGUS THOMY
NIP. 196508171988031002